

“MUNCULNYA GERAKAN MASSA II DI FILIPINA”

(Suatu analisis atas munculnya tuntutan
pengunduran diri terhadap Joseph Estrada)



SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat ujian
Guna memperoleh Gelar Sarjana Strata I (S1)
Jurusan Ilmu Hubungan Internasional
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional
pada
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER

Hadiah
Pembelian
Terima : Tgl, 25 NOV 2002
No. Induk .
sdm

Klass	322.599
WIC	m
	c.1

Oleh :

DODIK WICAKSONO

NIM. 960910101184

Pembimbing :

Drs. ASRIAL AZIS

NIP. 130 355 413

Asisten Pembimbing :

AGUS TRI HARTONO, S.SOS

NIP. 132 133 401

**JURUSAN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER**

2002

PENGESAHAN

Diterima dan Dipertahankan di depan Panitia Penguji Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember untuk melengkapi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Program Studi Hubungan Internasional

Pada Hari : Kamis
Tanggal : 29 Agustus 2002
Pukul : 09.00 WIB

Panitia Penguji

Ketua



Prof. Dr. A. Khusyairi, M.A
NIP. 130 261 689

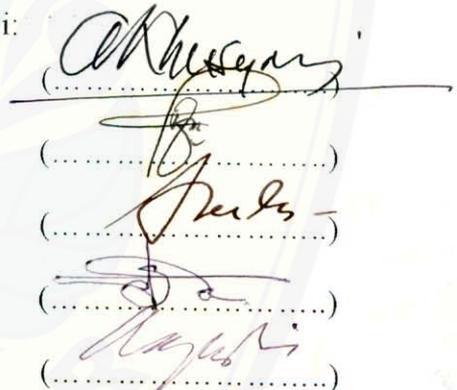
Sekretaris



Drs. Asrial Azis
NIP. 130 355 413

Anggota Tim Penguji:

1. Prof. Dr. A. Khusyairi, M.A.
2. Drs. Asrial Azis
3. Drs. Sjoekron Sjah, SU
4. Drs. Supriyadi, M.Si
5. Agus Tri Hartono, S.Sos



(.....)
(.....)
(.....)
(.....)
(.....)

Mengetahui
Dekan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Drs. H. Moch. Toerki
NIP. 130 524 832

Motto

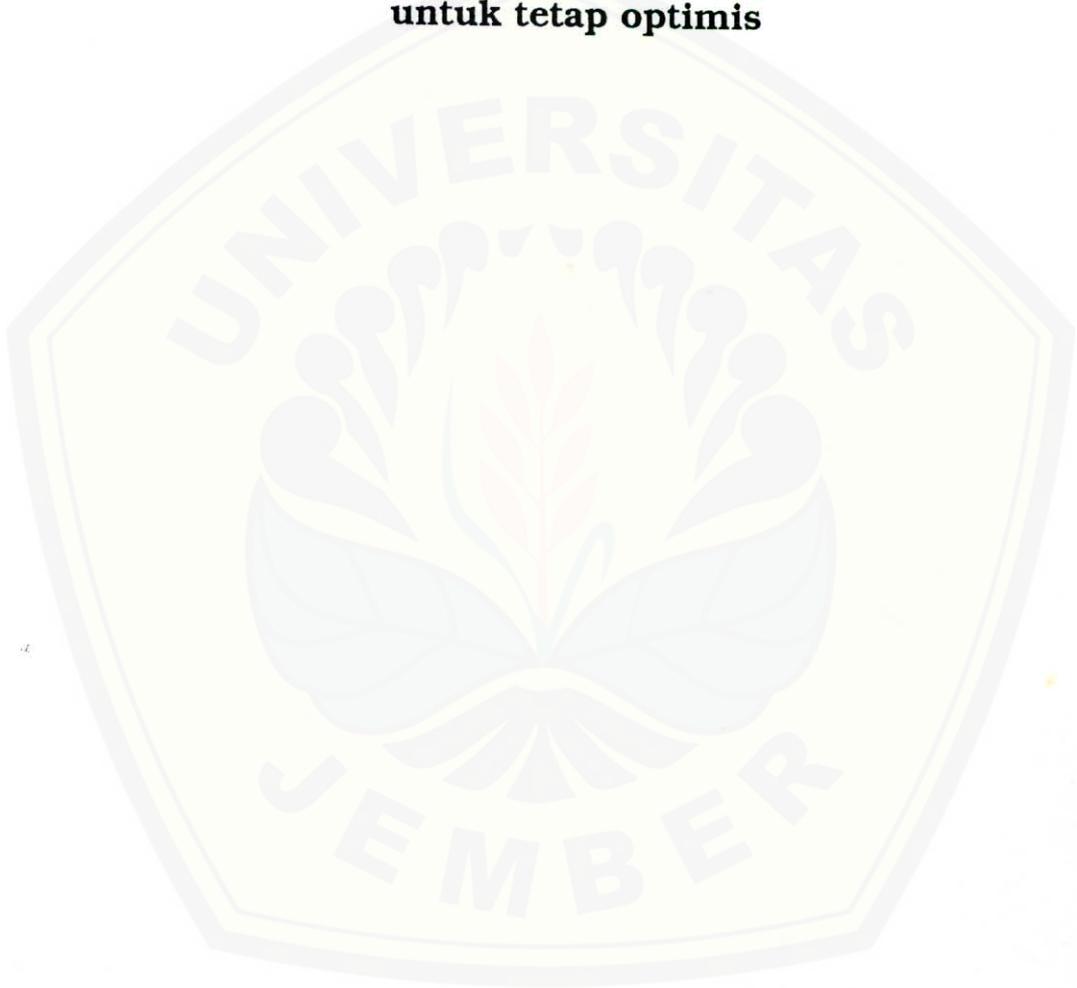
*“” Perubahan senantiasa memerlukan suatu tindakan untuk mengupayakan perbaikan atau perubahan, atas suatu kondisi yang dinilai tidak sesuai dengan harkat kemanusiaan, dan keadilan.”**



* Eric Hoffer, *Gerakan Massa*, Yayasan Obor Indonesia Jakarta, 1988

PERSEMBAHAN

Teruntuk Bapak dan Ibuku tercinta atas segala pengorbanannya, Saudara-saudaraku yang telah banyak membantu baik moril maupun materi, dan keponakan-keponakanku, yang selalu mendorongku untuk tetap optimis



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala limpahan Rahmat, Hidayah dan Ridho-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik. Penulisan karya tulis ini berawal dari ketertarikan penulis pada sebuah laporan khusus di Kompas yang mengupas secara khusus mengenai Gerakan Massa di Filipina. Penulisan skripsi ini sempat terhambat dikarenakan “penyakit malas” yang menimpa penulis beserta teman-teman seperjuangan lainnya, namun berkat dorongan semangat dari berbagai pihak maka penulis mampu menyelesaikan karya tulis ini sebelum batas akhir studi.

Dalam penulisan skripsi, penulis sadar masih banyak kekurangan yang ada, untuk itu kritik dan saran secara akademis yang membangun, akan memberikan dampak positif bagi penulis dan para pembaca skripsi ini nantinya.

Banyak pihak yang membantu dalam penyelesaian karya ini, baik itu dalam bentuk dorongan semangat, motivasi, materi maupun kritik merupakan bantuan yang tidak terkirakan pentingnya bagi penulis. Tidak ada kata yang dapat mewakili selain ucapan terima kasih yang tulus serta penuh hormat yang penulis sampaikan kepada :

1. Bapak Drs. Asrial Azis selaku dosen pembimbing penulis
2. Bapak Agus Tri Hartono S.Sos selaku asisten dosen pembimbing dan dosen wali penulis.
3. Bapak Drs. Sjoekron Sjah, SU, selaku Ketua Jurusan Hubungan Internasional Universitas Jember.
4. Bapak Drs. H. Moch Toerki, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Jember.
5. Mbak Nino dan si kecil “Dira” yang banyak membantu penulis selama menjalani Studi dan telah mengajarkan penulis untuk selalu bersikap dewasa dalam banyak hal.
6. Saudara tertuaku Drs. Abdul Azis dan mbak Yayuk yang telah banyak membantu penulis baik moril dan materi, sehingga penulis bisa melanjutkan studi di Jember, terima kasih banyak.

7. Lebih dari sekedar sahabat, kalian adalah saudaraku: Bayu Ashworo Hadi dengan semangat tertawanya, Dodit Soelaksono selamat menggapai cinta abadi, Arief Budiman (tetap semangat CS), Sulis & Didik si Bocah Tua Nakal. Uq, Udin dan Rendra yang telah menemani penulis selama di Jember. M. Ridho & Dini yang telah sepakat untuk bersama, Selamat !
8. Herlina (ade') kebersamaan yang pernah kita alami adalah proses bagi kita untuk sama-sama lebih dewasa, dibalik badai hujan pasti ada pelangi.
9. Saudaraku Afiat, Afik, Sony, Sibro, Narto semoga sukses menyertai kita semua. Kapan lagi nih long tripnya.
10. Sahabatku Nunung, Nana, Asna, Ananta, Nuri, Winokus, Nurul, Anik, Krisna, Lucas, Rijal, Joko. Semua tanpa terkecuali yang tak bisa penulis sebut satu persatu, terima kasih atas dorongannya untuk selalu semangat nulis
11. Mas Iqbal beserta keluarga yang telah banyak memberikan pinjaman buku dan motivasinya
12. Komunitas lain tempat belajar, bekerja dan bermain: Komfis "yakin usaha sampai"
13. Semua orang yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini dan tidak dapat disebutkan satu persatu, Matur Nuwun !

Hanya ucapan terima kasih yang tulus yang dapat penulis sampaikan dan semoga amal kebaikan yang diberikan mendapatkan balasan yang pantas dari Allah SWT.

Jember, Juni 2002.

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL		i
HALAMAN PENGESAHAN		ii
HALAMAN MOTTO		iii
HALAMAN PERSEMBAHAN		iv
KATA PENGANTAR		v
DAFTAR ISI		vii
BAB I PENDAHULUAN		1
I.1	Alasan Pemilihan Judul	1
I.2	Ruang Lingkup Pembahasan	5
	1.2.1 Batasan Waktu	6
	1.2.2 Batasan Materi	7
I.3	Permasalahan	8
I.4	Kerangka Dasar Teori	10
I.5	Hipotesis	15
I.6	Metode Penelitian	15
	1.6.1 Metode Pengumpulan Data	15
	1.6.2 Metode Analisis Data	16
I.7	Pendekatan	17
BAB II PROSES POLITIK NAIKNYA JOSEPH ESTRADA		19
II.1	Kondisi Geografis	19
II.2	Kehidupan Penduduk Filipina	19
II.3	Sistem Politik dan Pemerintahan Filipina	21
	2.3.1 Pemerintahan dapat membubarkan Majelis Nasional	25
	2.3.2 Kebijakanaksanaan Pemerintahan dalam Praktek	25

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL		i
HALAMAN PENGESAHAN		ii
HALAMAN MOTTO		iii
HALAMAN PERSEMBAHAN		iv
KATA PENGANTAR		v
DAFTAR ISI		vii
BAB I PENDAHULUAN		1
I.1	Alasan Pemilihan Judul	1
I.2	Ruang Lingkup Pembahasan	5
	1.2.1 Batasan Waktu	6
	1.2.2 Batasan Materi	7
I.3	Permasalahan	8
I.4	Kerangka Dasar Teori	10
I.5	Hipotesis	15
I.6	Metode Penelitian	15
	1.6.1 Metode Pengumpulan Data	15
	1.6.2 Metode Analisis Data	16
I.7	Pendekatan	17
BAB II PROSES POLITIK NAIKNYA JOSEPH ESTRADA		19
II.1	Kondisi Geografis	19
II.2	Kehidupan Penduduk Filipina	19
II.3	Sistem Politik dan Pemerintahan Filipina	21
	2.3.1 Pemerintahan dapat membubarkan Majelis Nasional	25
	2.3.2 Kebijakanaksanaan Pemerintahan dalam Praktek	25

II.4	Proses Politik Naiknya Estrada	26
	2.4.1 Situasi Politik Menjelang Pemilu 1998 di Filipina	26
	2.4.2 Masa Kampanye dan Pemilu	29
	2.4.3 Pelaksanaan Pemilu	31
	2.4.4 Penghitungan Suara Hasil Pemilu	31
	2.4.5 Janji Kampanye Joseph Estrada	33
	2.4.6 Faktor-faktor Penentu Kemenangan Joseph Estrada	36
BAB III SEJARAH GERAKAN MASSA DI FILIPINA		39
III.1	Gerakan Massa I di Filipina masa Marcos	39
	3.1.1 Elemen Yang Terlibat dalam Gerakan Massa I	47
	3.1.2 Krisis Kepemimpinan Marcos	50
III.2	Karakteristik Gerakan Massa I	53
BAB IV MUNCULNYA GERAKAN MASSA II DI FILIPINA		59
IV.1	Krisis Kepemimpinan Presiden Joseph Estrada	59
	4.1.1 Kasus Suap "Jueteng"	68
	4.1.2 Gagalnya Proses Impeachment	71
IV.2	Aktor Yang Terlibat Dalam Gerakan Massa II	75
IV.3	Karakteristik Gerakan Massa II	78
IV.4	Penyebab Munculnya Faktor Gerakan Massa II Di Filipina	80
IV.5	Pengaruh Gerakan Massa II Atas Jatuhnya Joseph Estrada	84
BAB V KESIMPULAN		87
DAFTAR PUSTAKA		ix
LAMPIRAN		xiii



BAB I PENDAHULUAN

I.1 Alasan Pemilihan Judul

Filipina yang berada di kawasan Asia Tenggara ini tergolong sebagai salah satu negara berkembang yang menginginkan dan sedang mengalami demokratisasi. Dua hal yang sangat fenomenal yakni terjadinya gerakan '*people power*'¹ baik pada era Marcos maupun Joseph Estrada adalah dua bukti kuat betapa proses transisi menuju demokrasi di negara tersebut terjadi.

Gerakan '*people power*' yang terjadi di Filipina baik pada era Marcos maupun Joseph Estrada, meskipun tampaknya memiliki pola yang sama namun agaknya memiliki substansi yang relatif berbeda. Persamaan pola agaknya terkait dengan terulangnya gerakan ekstra parlementer yang sangat berpengaruh kuat pada proses jatuhnya dua rezim tersebut. Namun substansi atau isu yang mencuat ke permukaan sungguh berbeda. Pada era Marcos isu tentang penghentian rezim penguasa yang totalirian menjadi isu utama yang menggerakkan '*people power*' disamping isu-isu seputar korupsi akut dari rezim Marcos. Sementara itu tuntutan yang mengiringi kejatuhan Joseph Estrada lebih mengarah pada tuntutan atas tindakan kebohongan publik dan korupsi yang merupakan rangkaian dari dinamika di parlemen yang kemudian menyulut gerakan di luar parlemen.

Kondisi riil yang terjadi di lapangan ketika terjadi aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh sebagian besar rakyat Filipina untuk menggulingkan Estrada, telah mengingatkan kita pada kondisi dimana rakyat Filipina melakukan '*kudeta*' serupa pada pemerintahan Marcos. Sehingga kemudian wacana '*kudeta*' dalam kerangka berpikir rakyat Filipina bukanlah suatu hal yang asing. Dalam konteks ini agaknya bisa dipahami kalau ada anggapan bahwa tingkat *kesadaran dan*

¹ People power itu merupakan istilah untuk gerakan perlawanan rakyat. Lebih khusus, ia menunjuk pada gerakan populer menuntut atau memaksa otoritas politik untuk melakukan perubahan sosial ekonomi ataupun politik. Otoritas politik bisa berupa kerajaan, kesultanan maupun pemerintahan negara modern, lihat Wimar Witoelar, *Perspektif Wimar*, www.gatra.com/

*partisipasi politik*² masyarakat Filipina relatif tinggi, mengingat masyarakat Filipina terlibat sedemikian luas, baik dalam bentuk wacana maupun gerakan dalam memecahkan persoalan politik di dalam negerinya.

Dalam melihat gerakan massa yang terkait dengan tuntutan turunnya Joseph Estrada dari puncak kekuasaan, sekurang-kurangnya terdapat dua arus pemikiran yang secara simultan sangat terkait. Dua arus tersebut adalah *pertama* bahwa tuntutan agar Joseph Estrada turun dari kekuasaannya terjadi di intraparlemen. Hal ini terlihat dari kuatnya desakan intra parlemen Filipina terutama dari kelompok oposisi yang menghendaki terjadinya proses *impeachment* terhadap skandal-skandal yang dilakukan oleh Joseph Estrada. Realitas ini sangat nyata terlihat dan secara langsung maupun tidak langsung menginspirasi wacana di luar parlemen. *Kedua*, menggelindingnya wacana atas turunnya Joseph Estrada di kalangan masyarakat luas yang mengentalkan gerakan ekstra parlemen yang dilakukan oleh masyarakat dengan dukungan dari kelompok keagamaan, mantan presiden Fidel Ramos serta Wakil Presiden Arroyo.

Kaitannya dengan yang pertama, yaitu tuntutan dari kelompok oposisi terkait dengan perdebatan mosi *Impeachment* terhadap Estrada. Perdebatan ini terkait dengan tuduhan bahwa Joseph Estrada menerima 414 juta peso antara November 1998 sampai Agustus 2000 dari para 'Gembong' perjudian. Tuduhan atas skandal ini dijadikan sebagai "*entry point*" untuk melakukan mosi bagi terjadinya *impeachment* terhadap Joseph Estrada. Namun mosi tersebut baru diproses lebih lanjut jika didukung sekurang-kurangnya 1/3 dari 218 anggota DPR. Selanjutnya yang terjadi kemudian adalah proses pembahasan di DPR, Senat dan akhirnya Kongres-lah yang membuat keputusan³. Sayangnya konstelasi politik di intra parlemen sangat menguntungkan Joseph Estrada, dimana kubu Joseph Estrada menguasai mayoritas suara. Padahal isu tentang skandal ini

² Istilah "*partisipasi politik*" telah digunakan dalam pelbagai arti. Apakah partisipasi politik itu hanya perilaku, atau mencakup pula sikap-sikap dan persepsi-persepsi yang merupakan syarat mutlak bagi perilaku partisipasi, umpamanya; informasi politik, persepsi seseorang tentang relevansi politik bagi urusannya sendiri, dan merupakan suatu keyakinan bahwa ia mampu mempengaruhi keputusan dan tindakan pemerintah. Jadi partisipasi politik hanya sebagai kegiatan warga negara yang bertujuan mempengaruhi pengambilan keputusan oleh pemerintah, baca Miriam Budiarjo, *Partisipasi dan partai politik*, Jakarta: Yayasan Obor. 1982

³ Tajuk Rencana, *Kompas*, 20 oktober 2000

dipandang oleh masyarakat Filipina sebagai cela yang sangat besar yang telah melorotkan legitimasi moral sebagai orang nomor satu di Filipina.

Beberapa tuntutan impeachment yang diajukan oleh kelompok oposisi di DPR adalah sebagai berikut⁴ :

1. Kasus Suap. Estrada diduga telah menerima 10 juta peso per bulan sebagai sebagai uang suap dari raja *jueteng*⁵, yang memberi suap termasuk diantaranya (yang memberi suap) Gubernur Hal itu terhitung mulai bulan November 1998 sampai Agustus 2000.
2. Praktik korupsi dan sogok menyogok. Estrada secara langsung maupun tidak langsung menerima untuk keuntungannya sendiri 130 juta peso, diluar 2000 juta peso yang dikeluarkan dari anggaran sekretaris Benjamin Diokno, seorang petani tembakau, dan secara langsung Estrada berpartisipasi dalam bisnis rumah mewah melalui perusahaan yang dikendalikan keluarganya. Perusahaan itu telah membangun sedikitnya 36 unit perumahan di salah satu bagian Manila yaitu Antipolo. Estrada juga terlibat dalam sumpah palsu dan kejahatan pertamanya tentang kekayaan yang “tidak bisa dipertanggung jawabkan”. Catatan yang ada menunjukkan, Estrada bersama istri dan anak-anaknya tertarik pada perusahaan lain diluar tiga firma yang sudah terdaftar dalam pertanggung jawaban aset tahun 1999.
3. Pengkhianatan terhadap kepercayaan publik. Estrada telah mengkhianati kepercayaan publik dan sumpahnya sendiri saat ia mengintervensi komisi bursa dan sekuritas pada persoalan manipulasi dalam perjudian perusahaan BW Resource Corp yang melibatkan salah seorang kroni presiden. Estrada juga dianggap tidak mentaati mandat konstitusi untuk menghindari konflik kepentingan ketika dia mengakui memindahkan dana bantuan pemerintah sebesar 100 juta peso ke yayasan pribadi yang dikelola istrinya. Serta Estrada telah dianggap melanggar pernyataannya sendiri sendiri yang diucapkan secara resmi bahwa dia tidak akan menunjuk atau memberi pos tertentu di pemerintahan kepada teman dekat atau saudaranya.

⁴ *Asia Week*, 22 December 2000.

⁵ *Jueteng* dalam bahasa tagalog yang berarti judi.

4. Pelanggaran terhadap konstitusi, Estrada telah melanggar hukum dan sumpahnya sendiri ketika dia memerintahkan anggota bea cukai untuk memindahkan 52 mobil mewah yang disita dari upaya penyelundupan, ke istana presiden. Mobil itu akan didistribusikan kepada anggota kabinet dan pejabat pemerintahan lainnya.

Sementara itu kaitannya dengan aspek kedua yakni gerakan ekstra parlementer, gerakan ini sebenarnya pada tahap awal mengikuti gerakan intra parlementer. Setidaknya pada tahapan pembentukan “isu” kontribusi publik opini yang dihasilkan oleh oposisi di parlemen sangat mempengaruhi. Namun penguatan gerakan justru terjadi akibat kelompok oposisi dipandang gagal dan bahkan tidak akan bisa berbuat banyak untuk melakukan impeachment terhadap Joseph Estrada. Karenanya kemudian aksi masa turun ke jalan merupakan pilihan yang paling mungkin dari terbatasnya alternatif lain yang bisa dilakukan. Aksi massa turun ke jalan ini oleh banyak pengamat politik⁶ dikatakan sebagai suatu gerakan “*People Power II*”. Terungkapnya beberapa skandal yang melibatkan Joseph Estrada dipandang oleh rakyat Filipina sebagai sebuah bentuk pengkhianatan terhadap amanat yang diberikan rakyat. *People power* untuk menuntut agar Joseph Estrada dihadapkan pada Mahkamah Agung agar mempertanggung jawabkan keterlibatannya dalam berbagai skandal adalah pilihan yang paling rasional.

Oleh karenanya, masyarakat Filipina menginginkan adanya pengadilan massa terhadap Estrada karena Impeachment melalui DPR dipandang kemungkinan berhasilnya relatif kecil. Hal itu terjadi karena koalisi yang berkuasa saat itu menguasai 80 % dari 218 kursi parlemen. Dominasi serupa terlihat di Senat yang beranggotakan 22 orang. Dengan komposisi yang demikian maka proses Impeachment melalui jalur parlemen tidak saja akan memakan waktu panjang, juga belum tentu akan berhasil. Terlebih proses Impeachment bukanlah sejarah baru dalam sejarah politik modern Filipina. Proses impeachment pernah dilakukan terhadap tiga presiden Filipina terdahulu, diktator Ferdinand Marcos,

⁶ Lihat Herry Yogaswara, *Dimensi Moral Presiden dan Gerakan Moral Rakyat di Filipina*, Kompas, 30 Oktober 2000

Diosdado Machapagal dan Elpidio Quirino. Namun tidak ada satupun dari proses itu yang berhasil.

Tuntutan itu semakin kuat setelah mantan Presiden Qorazon Aquino, Fidel Ramos serta pemimpin spiritual Filipina Jaime Kardina Sin ikut menyuarakan agar Estrada meletakkan jabatannya. Kondisi ini yang membuat para pengamat berpendapat bahwa posisi Estrada tidak ditentukan di parlemen, tetapi oleh gerakan massa rakyat Filipina⁷. Hal ini karena besarnya anggapan bahwa mekanisme di parlemen tidak mampu menjatuhkan Joseph Estrada.

Posisi Estrada justru semakin terpojok, ketika Wapres Ny Gloria Macapagal Arroyo terlihat menjaga jarak dengan Estrada dengan mengundurkan diri posisi rangkap sebagai Menteri Kesejahteraan Sosial. Bahkan Ny Arroyo mulai berbicara dengan para pemimpin oposisi untuk membangun front bersama. Secara konstitusi, Wakil Presiden otomatis akan menjadi presiden jika presiden tergeser dari jabatannya.

Berangkat dari ilustrasi itu, tulisan ini kemudian ingin mengetahui faktor-faktor apakah yang mempengaruhi munculnya tuntutan dan gerakan massa yang mendaki turunnya Joseph Estrada dari puncak kekuasaan Filipina. atas latar belakang inilah penulis mengajukan topik skripsi dengan judul:

“Munculnya Gerakan Massa II Di Filipina (Suatu Analisis Atas Munculnya Tuntutan Pengunduran Diri Terhadap Joseph Estrada).”

I.2 Ruang Lingkup Pembahasan

Batasan terhadap hal-hal yang hendak dibahas dalam suatu karya ilmiah sangat diperlukan agar penulisan tersebut sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai, dan juga untuk menghindari penjelasan yang terlalu luas yang justru tidak akan tuntas dalam menjawab permasalahan yang diajukan. Membatasi obyek atau pokok permasalahan fungsinya bagi penulis adalah memberikan batasan-

⁷ lihat, Kardinal Sin, *The Grand Conspiracy to Wreck the Erap Administration Big Business Mafia*, [http://www. Articles.com/Philippines/](http://www.Articles.com/Philippines/)

batasan yang akan menjadi pedoman kerja, dan bagi orang lain akan mencegah kemungkinan kerancuan pengertian dan kekaburan wilayah pengertian

Seperti dalam Sutrisno Hadi (1998):

“Sekali suatu pokok persoalan ditetapkan maka langkah berikutnya adalah membatasi luasnya dan memberikan formulasi yang tegas terhadap pokok persoalan tersebut. Bagi penyelidik sendiri penegasan ini akan menjadi pedoman kerja dan bagi orang lain kepada siapa laporan research itu hendak disajikan, penegasan berfungsi mencegah kerancuan pengertian dan kekaburan wilayah persoalan.”⁸

Lingkup bahasan ini dibagi menjadi dua:

1.2.1 Batasan Waktu

Penulis mengambil batasan waktu antara tahun 1999-2001. Dimulai tahun 1999 karena pada tahun tersebutlah diawalinya krisis kepemimpinan yang mengakibatkan posisi Joseph Estrada sebagai Presiden Filipina menjadi terancam. Rentetan krisis estrada tersebut dimulai pada 11 Maret 1999: dimana pada saat itu Presiden Estrada tercatat mengajukan gugatan pemulihan nama baik kepada *Manila Times* karena artikel yang mengatakan estrada menyetujui sebuah rencana pembangkit tenaga listrik yang tidak sesuai. Karena tuduhan yang tanpa bukti itu, ia mengintruksikan iklan boikot koran-koran yang kritis tanpa biaya dengan hidden motives untuk memberangus pers. Dari sinilah kemudian ketidakpercayaan terhadap Joseph Estrada menjadi semacam bola salju yang kemudian semakin menurunkan legitimasi Joseph Estrada di mata rakyat.

Tanggal 20 Agustus 2000: Puluhan ribu warga memprotes rencana Estrada mengamandemen konstitusi. Menurut mereka, rencana itu bisa membahayakan demokrasi di Filipina. Estrada kemudian membatalkan rencana tersebut. Pada bulan Januari 2000: Ketua Komisis Bursa dan Sekuritas, menuduh Estrada mencampuri penyelidikan atau investigasi kepada seorang temannya. Dan pada bulan Maret 2000: Seorang biarawati yang sangat dihormati Christian Tan, menuduh keluarga Estrada telah mengalihkan dana sebesar 10,5 juta dollar dari dana kesehatan pemerintah ke proyek pribadi mereka. Lalu pada tanggal 22 Maret

⁸ Sutrisno Hadi, *Metode Research*, Ansi Ofset, Yogyakarta, 1995, hal.18

2000, Estrada mengumumkan pengunduran diri anggota kabinetnya yang baru, Aprodicio Laquian. dan puncaknya adalah pada tanggal 18 Oktober 2000: yakni kelompok oposisi menuntut impeachment terhadap Estrada dan ribuan rakyat Filipina menuntut Estrada untuk mundur dari jabatannya⁹.

Sementara tahun 2001 diambil oleh penulis karena pada tahun inilah akhirnya munculnya *people power* yang menuntut Joseph Estrada untuk mundur dari jabatannya. Joseph Estrada sendiri akhirnya terpaksa harus menandatangani surat pengunduran dirinya, Sabtu, 20 Januari 2001¹⁰. Dan wakil presiden Nyonya Gloria Macapagal Arroyo segera mengambil alih istana kepresidenan untuk mengakhiri krisis politik yang terjadi di Filipina

1.2.2 Batasan Materi

Batasan materi adalah bagian-bagian yang menjadi pusat perhatian analisa yang dimaksudkan agar pembahasan tidak terlalu meluas sehingga tetap berpegang pada inti persoalan. Menurut J. David Singger :

“Dalam setiap bidang kegiatan keilmuan, selalu terdapat berbagai cara memilah-milah dan mengatur fenomena yang dipelajari demi analisis yang sistematik... harus memilih pusat perhatian, pada bagiannya atau seluruh Fenomena itu, pada komponennya atau pada sistemnya ...”¹¹

Penulis memusatkan perhatian pada fenomena yang menyebabkan gagalnya impeachment yang dilakukan oleh kalangan oposisi di parlemen yang menyebabkan mencuatkan kembali *people power* yang menjatuhkan Joseph Estrada dari puncak kekuasaan. Agar analisis ini tidak terlepas dari konteks sejarahnya, akan dibandingkan pula aspek-aspek gerakan masa, baik pada era Marcos maupun Estrada. Selanjutnya akan mencoba pula melihat mengapa oposisi di parlemen gagal melakukan impeachment, serta seberapa jauh kegagalan ini mempengaruhi gerakan masa II yang menjatuhkan Joseph Estrada. Selain itu akan dilihat pula isu serta aktor-aktor yang turut serta dalam gerakan massa II ini.

⁹ *Kompas*, 19 Oktober 2000

¹⁰ <http://www.gatra.com/estrada.html>

¹¹ J. David Singger, dalam Mohtar Mas'ood, *Ilmu Hubungan Internasional Disiplin dan Metodologi*, LP3ES, Jakarta, 1994, hal. 231.

2000, Estrada mengumumkan pengunduran diri anggota kabinetnya yang baru, Aprodicio Laquian. dan puncaknya adalah pada tanggal 18 Oktober 2000: yakni kelompok oposisi menuntut impeachment terhadap Estrada dan ribuan rakyat Filipina menuntut Estrada untuk mundur dari jabatannya⁹.

Sementara tahun 2001 diambil oleh penulis karena pada tahun inilah akhirnya munculnya *people power* yang menuntut Joseph Estrada untuk mundur dari jabatannya. Joseph Estrada sendiri akhirnya terpaksa harus menandatangani surat pengunduran dirinya, Sabtu, 20 Januari 2001¹⁰. Dan wakil presiden Nyonya Gloria Macapagal Arroyo segera mengambil alih istana kepresidenan untuk mengakhiri krisis politik yang terjadi di Filipina

1.2.2 Batasan Materi

Batasan materi adalah bagian-bagian yang menjadi pusat perhatian analisa yang dimaksudkan agar pembahasan tidak terlalu meluas sehingga tetap berpegang pada inti persoalan. Menurut J. David Singger :

“Dalam setiap bidang kegiatan keilmuan, selalu terdapat berbagai cara memilah-milah dan mengatur fenomena yang dipelajari demi analisis yang sistematik... harus memilih pusat perhatian, pada bagiannya atau seluruh Fenomena itu, pada komponennya atau pada sistemnya ...”¹¹

Penulis memusatkan perhatian pada fenomena yang menyebabkan gagalnya impeachment yang dilakukan oleh kalangan oposisi di parlemen yang menyebabkan mencuatkan kembali *people power* yang menjatuhkan Joseph Estrada dari puncak kekuasaan. Agar analisis ini tidak terlepas dari konteks sejarahnya, akan dibandingkan pula aspek-aspek gerakan masa, baik pada era Marcos maupun Estrada. Selanjutnya akan mencoba pula melihat mengapa oposisi di parlemen gagal melakukan impeachment, serta seberapa jauh kegagalan ini mempengaruhi gerakan masa II yang menjatuhkan Joseph Estrada. Selain itu akan dilihat pula isu serta aktor-aktor yang turut serta dalam gerakan massa II ini.

⁹ *Kompas*, 19 Oktober 2000

¹⁰ <http://www.gatra.com/estrada.html>

¹¹ J. David Singger, dalam Mohtar Mas'ood, *Ilmu Hubungan Internasional Disiplin dan Metodologi*, LP3ES, Jakarta, 1994, hal. 231.

I.3 Permasalahan

Problematika diperlukan guna mencari permasalahan-permasalahan yang muncul dan akan dibahas guna mencari suatu kesimpulan dari suatu persoalan. Persoalan-persoalan inilah yang menjadi akar penelitian seorang peneliti untuk dapat membongkar suatu kasus. Prof. Dr. Winarno Surachmad mengatakan bahwa:

“Problematika adalah setiap kesulitan yang menggerakkan manusia untuk memecahkannya. Masalah harus dirasakan sebagai rintangan yang mesti dilalui atau dengan jalan mengatasinya, karena apabila kita berjalan terus, masalah akan menampakkan diri sebagai suatu tantangan”¹².

Jadi problematika itu merupakan kesulitan-kesulitan yang ditemui peneliti dari kesulitan-kesulitan yang ada, untuk dapat dicari jawaban-jawaban yang tepat, serta akurat dari permasalahan yang muncul.

Penulis melihat permasalahan yang terjadi di Filipina dimulai pada saat terungkapnya berbagai skandal yang melibatkan Presiden Joseph Estrada. Kondisi ini berimplikasi pada munculnya tuntutan dari rakyat Filipina agar Estrada segera diproses melalui jalur hukum di intra parlemen dalam bentuk impeachment terhadap Joseph Estrada, namun masyarakat Filipina merasa pesimis bahwa proses impeachment itu akan berhasil, mengingat konstelasi politik yang ada di tingkat parlemen sangat menguntungkan pihak Estrada, karena 80 % dari 218 kursi parlemen merupakan koalisi kubu Joseph Estrada dari Labang Makabayang Masang Pilipino, LAMMP. Dominasi serupa terlihat di Senat yang beranggotakan 22 orang. Dengan komposisi yang demikian maka proses Impeachment melalui jalur parlemen tidak saja akan memakan waktu panjang, juga belum tentu akan berhasil, asumsinya jika seandainya proses pembuatan keputusan mengenai kasus suap itu menemui jalan buntu maka akan ditempuh melalui mekanisme voting, hal itulah yang tidak dikehendaki oleh rakyat Filipina sehingga rakyat terpicu untuk mengadakan sebuah gerakan aksi massa yang berlangsung serentak diberbagai kota besar di Filipina.

¹² Winarno Surachmad, *Pengantar Metodologi Ilmiah*, Tarsito, Bandung, 1975, Hal. 23

Aksi massa rakyat Filipina untuk memprotes Joseph Estrada pada akhirnya semakin kuat karena mendapat dukungan penuh dari pihak gereja katolik Filipina, Kardinal Sin dan beberapa tokoh masyarakat Filipina yang sebelumnya mereka adalah pendobrak rezim Marcos, Cory Aquino dan mantan presiden Filipina, Fidel Ramos. Mereka tergabung dengan pihak oposisi yang dipimpin oleh Gloria Macapagal Arroyo, mantan wakil presiden Joseph Estrada yang telah mengundurkan diri sebelumnya. Proses Impeachment Estrada di House Of Representatif pada akhirnya gagal di tingkat senat walaupun di sidang majelis rendah, disepakati untuk melakukan impeachment terhadap Joseph Estrada. Untuk meloloskan tuntutan impeachment sendiri hanya diperlukan 1/3 dari seluruh jumlah anggota DPR yang seluruhnya berjumlah 218 orang. Dengan dasar itulah maka mosi impeachment dapat dibicarakan ditingkat senat. Gagalnya mosi impeachment ini di sebabkan oleh tidak bersedianya Joseph Estrada untuk diperiksa catatan rekening bank miliknya, sedangkan untuk dapat menjatuhkan mosi impeachment, harus disetujui oleh dua pertiga jumlah anggota senat yang seluruhnya telah menjadi 22 orang dari semula yang berjumlah 24 orang karena salah seorang dari anggota senat itu meninggal dan seorang lagi mengundurkan diri sidang yang dilakukan oleh senat pada akhirnya harus menemui jalan buntu oleh karena hasil voting di senat juga menolak untuk melakukan proses auditing terhadap kekayaan pribadi Joseph Estrada. Senat yang komposisi keanggotaannya mayoritas pro Joseph Estrada memiliki argumen pembelaan bahwa nomor rekening itu bukan bagian dari pasal dalam impeachment, sebagian anggota senat yang juga bertindak sebagai juri pada akhirnya melakukan protes terhadap keputusan tersebut dengan mengundurkan diri, akibat pengunduran diri sebagian anggota senat ini maka proses impeachmentpun ditunda sampai batas waktu yang tidak terbatas.

Kegagalan proses impeachment ini akhirnya memicu terjadinya gerakan massa di Filipina, masyarakat Filipina menganggap Joseph Estrada sudah tidak layak lagi menjadi presiden Filipina maka rakyat Filipina menuntut Joseph Estrada agar segera turun dari jabatannya sebagai presiden Filipina karena telah mengingkari amanah yang telah diberikan oleh rakyat.

Digital Repository Universitas Jember

Beranjak dari masalah tersebut, dapat kita telaah bahwa dalam konteks ini terdapat dua akar permasalahan yang saling terkait, *pertama* adanya gerakan intraparlemen yang menghendaki adanya impeachment terhadap skandal-skandal yang dilakukan Joseph Estrada. *Kedua*, adanya gerakan ekstra parlemen yang dilakukan oleh masyarakat Filipina dengan dukungan dari kelompok oposisi yang dipimpin oleh Gloria Macapagal Arroyo yang mendesak Joseph Estrada untuk segera lengser dari jabatannya.

Dari beberapa penjelasan diatas, skripsi ini berusaha untuk menjawab beberapa pertanyaan tentang faktor penyebab munculnya gerakan massa II dan bagaimana karakteristik gerakan massa I dan II di Filipina ?

1.4 Kerangka Dasar Teori

Dalam melakukan sebuah proses analisa terhadap suatu fenomena agar diperoleh sebuah deskripsi dan eksplanasi yang memadai, dibutuhkan kerangka konseptual agar analisa yang dilakukan memiliki fokus dan panduan yang jelas. Hal ini penting karena akan mempengaruhi hasil dan kesimpulan dari sebuah analisis. Dalam melakukan analisis terhadap materi ini, penulis akan menggunakan *teori Gerakan Massa* dari Eric Hoffer. Teori ini melihat bahwa dalam banyak kasus gerak(an) perubahan secara mendasar ditentukan oleh dinamika dan konfigurasi kekuasaan. Yang dimaksud adalah perubahan pada gilirannya akan ditentukan oleh tarik menarik antara kekuatan yang menghendaki perubahan dan kekuatan yang tidak menginginkan perubahan. Konfigurasi kekuatan akan sangat memberi warna.

Dari pemahaman tersebut, menurut Eric Hoffer terdapat beberapa unsur yang bisa dikatakan menjadi variabel utama konsep gerakan yang dikembangkan disini :¹³

1. Keadaan masa kini yang dipandang buruk, menyimpan ketidakadilan, dan karena itu akan diubah. Baik tidaknya keadaan masa kini merupakan penilaian yang sangat subyektif.

¹³ Eric Hoffer, *Gerakan Massa*, Yayasan Obor Indonesia Jakarta, 1988, hal 3.

2. Keadaan masa depan, yang menjadi harapan, dalam hal ini menjadi identifikasi sebagai keadaan baru yang lebih baik dan bermakna. Sebagaimana masa kini, masa depan yang dimaksud disini merupakan cita-cita yang bersifat subyektif, yakni keadaan yang dibayangkan, diharapkan dan diperjuangkan oleh pihak yang mendorong perubahan.
3. Pihak penguasa, rejim, sebagai penanggung jawab keadaan. Tidak bisa dihindari bahwa penguasa pada akhirnya harus menuai perlawanan atas tindakan atau keadaan yang diciptakan.. Maka tidak heran bila penguasa segera menuding pelaku gerakan sebagai subversi.
4. Pihak yang melawan, yang menjadi kekuatan yang memiliki kepentingan untuk mendorong perubahan.
5. Dinamika konflik antar berbagai kekuatan yang ada. Dalam dinamika ini pula akan ditentukan apakah suatu gerakan bisa mencapai hasil yang diharapkan, atautkah kandas dan gagal.

Bila dilihat dari sifat (bagaimana munculnya gerakan, dan sebab-sebab yang mendasari) dan tujuan (sesuatu yang ingindicapai, dan atas dasar apa tujuan tersebut ingin dicapai), menurut Timur Mahardika dapat dikatakan bahwa terdapat dua tipe (karakter) umum gerakan¹⁴, yakni:

1. Gerakan sebagai suatu reaksi spontan; sebab-sebab yang tidak begitu jelas (atau tidak mempunyai rumusan yang jelas); menggunakan jaringan informasi yang tidak tertata (bukan dikonstruksi secara sengaja); terhadap suatu keadaan tertentu.
2. Gerakan sebagai langkah-langkah terorganisir dengan tujuan, strategi dan cara-cara yang dirumuskan secara jelas sadar dan didasarkan kepada suatu analisis sosial yang kuat.

¹⁴ Timur Mahardika, *Gerakan Massa*, LAPERA, Yogyakarta, 2000, hal. 15

Dua Tipe Gerakan

Kategori	Tipe 1	Tipe 2
Bentuk/sifat	Spontan /emosional tidak terorganisasi	Terencana/ kalkulasi/ terorganisasi
Tujuan-sifat tujuan	Mempertahankan/ memperbaiki/ bukan perubahan mendasar.	Mengubah secara menadasar/ dengan anasis sosial

Pada yang pertama menunjuk suatu sifat spontan, emosional, "tidak rasional" dan tanpa suatu perencanaan yang jelas. Bahkan tanpa organisasi yang kuat. Tipe demikian dapat ditemukan dalam berbagai contoh yang hidup dimasyarakat, seperti aksi pembakaran tebu di desa-desa sebagai bentuk protes petani dan berbagai bentuk lainnya. Ciri dasar gerakan tipe ini adalah sifatnya yang merupakan reaksi langsung atas ancaman yang sudah "hadir dihadapan mereka". Reaksi tersebut bersifat spontan dan seringkali sulit untuk kita ketahui kelanjutannya tentang apa dan bagaimana langkah selanjutnya (apa dan bagaimana langkah selanjutnya). Pada yang *kedua*, bentuk gerakan telah menggunakan organisasi dan memanfaatkan instrumen demokrasi yang ada, seperti pers, parlemen atau institusi non-pemerintah dalam mengedepankan persoalan yang ada. Perbedaan dasar dengan gerakan tipe pertama, tipe gerakan ini mengembangkan perlawanan dengan dasar argumen yang berbasis analisis sosial yang kuat, yang didukung oleh hasil penyelidikan sosial yang akurat titik berangkat perlawanan bukan pada desakan emosi, melainkan kalkulasi yang bersifat rasional meski tidak bisa diingkari bahwa emosi merupakan faktor penting dalam gerakan tipe apapun. Gerakan seperti ini dapat dilihat juga sebagai sebuah bentuk perlawanan terbuka, seperti aksi oleh kelompok-kelompok mahasiswa, pemuda, partai politik, atau kekuatan sosial yang lain. Adapun ciri dari gerakan ini adalah perlawanan yang "sistematik" dan terorganisir

Dalam mempertajam analisa penulis juga menggunakan teori "*Aksi Kolektif*" sebuah tesis yang dikemukakan oleh Wiliam Gamson dan Charles Tilly¹⁵. Teorisasi pada kategori ini memusatkan perhatian besar pada persaingan

¹⁵ Charles Tilly, *From Mobilization to Revolution*, reading; addison-wesley.1978

atau konflik perebutan kekuasaan (perebutan dukungan massa) antara pemerintah yang berkuasa dengan kelompok-kelompok penentang terorganisir. Artinya dalam pemahaman Tilly bahwa “aksi kolektif” lebih dimaknai sebagai tindakan sekelompok orang secara bersama dalam mencapai tujuan bersama. Jadi berdasar definisi ini perubahan sosial dan bentuk-bentuk protes sosial merupakan bentuk dari aksi kolektif, menurut Tilly ketidakpuasan rakyat saja (baik akibat dislokasi sosial, modernisasi atau sebab-sebab lainnya) tidak serta merta membuat mereka melakukan aksi kolektif. Ketidakpuasan yang meluas adalah pendorong tetapi bukan merupakan pendorong paling utama menuju aksi kolektif. Rakyat yang tidak puas tidak turut berpartisipasi aktif dalam aksi kolektif kecuali mereka menjadi bagian dari satu kelompok terorganisir yang memiliki beberapa sumber daya. Menurut Tilly dalam “aksi kolektif” terdapat dua elemen penting yakni organisasi dan sumber daya selain kondisi obyektif berupa ketidakpuasan yang meluas bahkan ancaman yang dikembangkan oleh pemerintah dan kelompok-kelompok kontra tak bisa menyurutkan partisipasi rakyat tak puas yang telah terorganisir dan memiliki sumber daya otonom untuk melakukan aksi kolektif. Tilly selanjutnya menggunakan dua model umum untuk menganalisis aksi kolektif, *pertama* model masyarakat politik dan *kedua* model mobilisasi. Unsur pokok model masyarakat politik adalah pemerintah (organisasi yang mengendalikan sarana-sarana kekerasan) dan kelompok-kelompok yang memperebutkan kekuasaan. Model mobilisasi termasuk variabel yang dirancang untuk memperjelas pola aksi kolektif yang dilakukan oleh kelompok-kelompok tertentu. Variabel ini mengacu pada kepentingan kelompok, tingkat pengorganisasian, besarnya sumber daya yang ada dibawah kendali kolektif, serta pada kesempatan dan ancaman yang dipakai oleh pesaing-pesaing tertentu dalam hubungannya dengan pemerintah dan kelompok pesaing lain.

Aksi kolektif menurut Gamson¹⁶ bertolak dari keberadaan kepentingan yang sama di masyarakat¹⁷ Gamson membangun teori “aksi kolektif” beawal dari konsep pemikiran Mancur Olson bahwa individu dengan kepentingan yang sama

¹⁶ ibid

¹⁷ sedangkan menurut Tilly aksi kolektif lebih bertolak dari ketidakpuasan yang meluas

biasanya mencoba mewujudkan kepentingan bersama itu sehingga sekelompok individu dengan kepentingan yang sama diyakini bakal bertindak karena kepentingan yang sama diyakini bakal bertindak karena kepentingan yang sama itu, namun tindakan ini dapat berlangsung jika terdapat kondisi khusus yang menyebabkan tindakan bersama itu bisa berlangsung. Kondisi khusus yang mendorong kelompok-kelompok individu dengan kepentingan yang sama untuk bertindak inilah yang selanjutnya menjadi tema sentral argumentasi Gamson. Dengan demikian, aksi kolektif terjadi “ketika terbangun kondisi khusus yang membuat sekelompok orang dengan kepentingan sama yang telah terorganisir bertindak untuk mengejar kepentingan yang sama. Untuk itu, kelompok yang terorganisir harus lebih dulu mengatasi “kontrol sosial internal” yang selalu ada dalam kelompok untuk membangun kondisi khusus dan militansi bagi aksi kolektif.

Kaitannya dengan tema ini secara sederhana digambarkan, bahwa: awalnya gerakan massa yang terjadi pada masa Joseph Estrada merupakan reaksi yang bersifat spontan atas beberapa skandal isu. Masyarakat memandang keadaan pemerintah Joseph Estrada menyimpan ketidakadilan dan telah melakukan sebuah kebohongan publik, hal ini adalah variabel utama dalam gerakan massa. Oleh karena itu pihak oposisi di DPR kemudian berusaha untuk mengimpeachment Estrada namun gagal, kegagalan proses intra parlemen inilah yang akhirnya mendorong munculnya gerakan ekstra parlemen mendesak Estrada untuk mundur dari jabatannya. Gerakan protes dari rakyat Filipina untuk menuntut agar supaya Estrada mundur dari jabatannya sebagai presiden dapat dikategorikan sebagai sebuah bentuk gerakan yang bersifat spontan namun terorganisir, artinya ada muatan politis yang sangat besar dalam gerakan massa tersebut. Seringkali gerakan yang terorganisir dan kuat berasal dari gerakan yang bersifat spontan, begitupun sebaliknya, gerakan yang terorganisir yang didesain dengan serius, dengan perencanaan dan analisis sosial yang kuat dapat pula hanya menjadi sebuah tindakan iseng dari para pelaku untuk sekedar dijadikan sebagai tunggangan politik. Dari teori tersebut di atas dapat kita ketahui, tidak menutup kemungkinan bahwa gerakan-gerakan yang nampak sebagai gerakan spontan,

sesungguhnya merupakan gerakan sistematis dan terorganisir dengan memanfaatkan isu yang mampu membentuk opini publik dengan cepat dan efisien dengan memanfaatkan momentum yang tepat, kapan suatu isu akan dimunculkan untuk memancing emosi masyarakat untuk melakukan apa yang menjadi target gerakan

1.5 Hipotesis.

Dari permasalahan yang telah dijelaskan diatas dan berpegang pada landasan teori yang ada, maka penulis, mengajukan hipotesis bahwa faktor penyebab mengapa munculnya gerakan massa II sehingga muncul pula tuntutan agar presiden Estrada mundur dari jabatannya sebagai presiden Filipina adalah sebagai berikut :

“Terungkapnya berbagai skandal korupsi, suap atas diri Joseph Estrada, membuat masyarakat Filipina menilai bahwa pemerintahan Estrada tak ubahnya seperti masa kepemimpinan Marcos., macetnya upaya penyelesaian melalui gerakan intra parlementer ternyata telah memicu rakyat Filipina untuk melakukan gerakan ekstra parlemen untuk menuntut Joseph Estrada agar mundur dari jabatannya sebagai presiden. dan diadili secara hukum”

1.6 Metode Penelitian

metode yang dilakukan dalam suatu penelitian harus diuraikan sejelas-jelasnya sehingga semua pihak yang hendak menganalisa permasalahan yang sama setiap langkah dan dapat mengulangi sendiri penelitian itu jika diperlukan. Sutrisno Hadi mengatakan, riset dapat dipandang sebagai *“the repeated search to the unknown.”*¹⁸

1.6.1 Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan suatu tahapan dimana penulis melakukan penelitian terhadap sumber data dan data yang dianggap relevan bagi penyelesaian masalah yang diajukan. Pengujian hipotesis dari studi ini dilakukan dengan metode non-reaktif yakni observasi yang tidak memerlukan reaksi dari

¹⁸ *Ibid*, hal.7

obyek penelitian. salah satunya adalah penelaahan secara sistematis atas dokumen, catatan sejarah, berita koran dan segala informasi yang tercatat.¹⁹ Sehingga data yang diperoleh bersifat data sekunder yakni kumpulan laporan dari pihak lain yang sebelumnya berasal dari sumber yang asli. Pengambilan data dilakukan oleh penulis dari:

1. Perpustakaan Cental for Strategic and International Studies, Jakarta.
2. Perpustakaan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia , Jakarta.
3. Perpustakaan Pusat Universitas Jember.
4. Perpustakaan FISIP, Universitas Jember.

Penulis juga mengambil dari sumber-sumber data yang lain untuk memperoleh tambahan wawasan yang dapat membantu penulis dalam memecahkan permasalahan yang diajukan.

1.6.2 Metode Analisis Data

Metode anallisis data adalah uraian tentang cara mengkaji data dan mengolah data awal sehingga menjadi data atau informasi dan tentang cara analisisnya.²⁰ Dalam penulisan karya ilmiah ini digunakan *metode deduktif*. Menurut Mohtar Mas' oed metode deduktif adalah :

“menarik prinsip-prinsip umum dengan menghasilkan prinsip yang lebih rendah sehingga sesudahnya kita bisa menguji masing-masing preposisi dengan menelaah peristiwa-peristiwa khusus untuk melihat apakah kasus itu bisa dijelaskan dan diramalkan dengan teori yang telah diterapkan.”²¹

Sesuai dengan metode tersebut yang digunakan untuk mempermudah penulis dalam menyajikan bentuk paparan penulisan, maka penulis menggunakan teori gerakan massa sebagai alat analisis permasalahan yang telah ditetapkan diatas. Terciptanya gerakan massa dalam teori ini merupakan sebuah ketertarikan beberapa variabel utama dalam terciptanya sebuah gerakan massa, yaitu masyarakat menilai keadaan yang ada pada saat sekarang lebih buruk, menyimpan ketidakadilan, dan karena itu harus dirubah. Walaupun baik buruknya keadaan masa kini merupakan penilaian yang subyektif namun upaya untuk merubah

¹⁹ Mohtar Mas' oed, *Loc. Cit.* hal.180

²⁰ Badan Penerbit UNEJ, 1998, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, Jember, hal. 18

²¹ Mohtar Mas' oed, *Loc. Cit.* hal.80

keadaan saat itu dapat dilakukan dengan berbagai cara salah satunya adalah dengan gerakan massa untuk melakukan sebuah aksi moral sebagai bentuk penekanan bagi pembuat keputusan dalam sebuah negara. Kondisi riil yang ada di Filipina adalah, rakyat Filipina memandang bahwa dalam pemerintahan Estrada terjadi banyak kecurangan, korupsi dan nepotisme yang sangat merugikan negara. Beberapa kasus tersebut terungkap setelah beberapa orang terdekat Estrada membeberkan hal tersebut di media massa, terungkapnya kasus tersebut dapat dimanfaatkan dengan baik oleh kelompok oposisi untuk memanfaatkan opini publik tersebut sebagai jalan untuk menyingkirkan Estrada dari kursi kepresidenan. Jadi disini terdapat kekuatan yang ikut mendorong terciptanya perubahan.

1.7 Pendekatan

Pendekatan diperlukan untuk mempermudah dalam mengolah data yang diperoleh sehingga mendapatkan hasil yang benar-benar tepat bagi penulisan karya tulis, seperti yang disampaikan oleh Miriam Budiarmo, yaitu:

“pendekatan mencakup standart atau tolok yang dipakai untuk memilih masalah yang menentukan data mana saja yang akan diteliti dan data mana yang hendak dikesampingkan.”²²

Sedangkan menurut The Liang Gie pendekatan merupakan cara atau langkah berulang kembali sehingga menjadi pola untuk menggali pengetahuan tentang suatu gejala. Pada awalnya ini merupakan cara atau langkah untuk mengumpulkan data-data, sedangkan pada akhirnya merupakan suatu cara atau langkah untuk mengumpulkan data-data, sedangkan pada akhirnya merupakan suatu cara yang dibuat mengenai suatu gejala yang sedang diteliti.²³

Pendekatan yang digunakan dalam penulisan karya tulis ini adalah pendekatan sejarah politik atau political historis Approach, yaitu pendekatan yang menggunakan suatu deskripsi kronologis dari kenyataan politik mengenai

²² Miriam Budiarmo, *Pendekatan-pendekatan dalam Ilmu Politik*, Jurnal Ilmu Politik, AIPI, Jakarta, 1986, hal. 4

²³ The Liang Gie, *Ilmu Politik*, Gajahmada University Press, Yogyakarta, 1979, hal. 79

berbagai hal, baik itu bersifat Institusional ataupun non konstitusional dalam kehidupan suatu negara (sosial politik) dalam kebijakan dalam negeri maupun dalam hubungan dengan negara lain atau politik luar negeri atau kebijakan dalam negeri.²⁴

Dari pendekatan tersebut maka penulis berusaha menyajikan suatu sejarah mengenai faktor-faktor penyebab munculnya gerakan massa II di Filipina yang terdiri dari hampir seluruh komponen masyarakat terlibat dalam aksi damai tersebut, aksi massa ini juga mendapat dukungan dari angkatan bersenjata Filipina dan juga pihak gereja sendiri tidak keberatan dengan aksi massa sehingga pada puncak perseteruan politik yang terjadi berakibat melahirkan polemik tentang kursi kepresidenan sehingga memaksa Mahkamah Agung Filipina untuk melantik Arroyo, turunya Estrada ini penuh dengan nuansa politis

²⁴ *Ibid*, hal.87



BAB II

PROSES POLITIK NAIKNYA JOSEPH ESTRADA

2.1 Kondisi Geografis Filipina

Pada peta bumi, Wilayah Kepulauan Filipina terletak diantara 5 dan 21 lintang utara (diatas khatulistiwa) serta 117 dan 126 bujur timur. Batas-batasnya, sebelah utara dengan Laut Cina dan Pulau Formosa (Taiwan), sebelah selatan dengan wilayah laut Kepulauan Indonesia, sebelah timur dengan samudera pasifik, dan sebelah barat dengan laut Cina selatan. Seluruh wilayah daratan negeri itu terdiri atas kurang-lebih 7.107 pulau besar dan kecil, dengan perkiraan luas wilayahnya sekitar 300.000 kilometer persegi. Pulau tersebut adalah Luzon, Mindano, samar, Panay, Mindoro, Negros, Visayan, Palawan, Leyte, Bohol, dan Masbate.

Sedangkan Manila yang merupakan ibukota negara ini terletak disebelah pulau Luzon. Kota metropolitan Manila yang menjadi ibu kota Republik Filipina terletak di wilayah selatan Pulau Luzon. Kota-kota penting lainnya di Filipina di antaranya adalah Zamboanga, Davao, Tarlac, San Pablo, Batangas, Legaspi, Iloilo, Ormoc, Naga, dan Calbayang.

2.2 Kehidupan Penduduk Filipina

Seperti Indonesia, Filipina juga terdiri atas beragam suku bangsa dengan bahasa sendiri-sendiri. Suku Moro yang beragama Islam tinggal di wilayah selatan, terutama dipulau Mindanao dan kepulauan Sulu. Hampir 90% penduduk Filipina menganut agama Kristen Katholik. Sisanya adalah Islam, Protestan, Budha dan Konghucu yang dianut oleh kaum imigran turunan Cina. Orang-orang Cina kebanyakan tinggal di kota-kota, dan pencaharian mereka pada umumnya berdagang. Warga negara Filipina sekitar 70% masih hidup dari usaha pertanian sisanya menjadi buruh, pegawai pemerintah dan swasta, pengusaha, tentara, guru dosen atau pendeta. Sebagai warisan sistem penjajahan, penduduk suku Moro yang beragama Islam tidak begitu memperoleh kesempatan dalam pemerintahan

Di Filipina banyak tuan tanah yang memiliki tanah-tanah yang amat luas, dan berkuasa atas tanah-tanah mereka dengan segala isi yang ada di atasnya, termasuk perkampungan penduduk. Pemilikan tanah-tanah itu, antara lain, merupakan warisan masa penjajahan Spanyol. Para tuan tanah di Filipina disebut dengan *Hasiendaros*. Mereka itu tidak berhubungan langsung dengan parta petani tebu atau *sacada*, tetapi melalui perantara yang merupakan orang upahan mereka. Tuan-tuan tanah itu hidup bagaikan raja-raja kecil yang memiliki pasukan keamanan sendiri, dengan praktek-praktek buruk yang seolah tidak terjangkau oleh hukum. Mereka ini disebut dengan *Centratiesta* yang membuat kehidupan para *sacada* lebih buruk lagi.

Para *Hasiendaros* dan *centratiesta* hidup berlimpah, sementara petani tebu cukup boleh berpuas dengan menghisap batang-batang tebu yang mereka tanam sebagai makanan mereka. Karena penguasaan tanah pada umumnya di Filipina ada ditangan segelintir orang, maka ketika harga gula jatuh di pasaran dunia, yang paling merasakan akibatnya justru para *sacada*, bukan *hasindaros* atau *centratiesta*. Selama ketimpangan sosial belum dibenahi, Filipina akan masih harus berjuang melawan gerakan komunis, sebab golongan rakyat miskin seperti kaum *sacada* itu merupakan umpan ideologi yang empuk.

2.3 Sistem Politik dan Pemerintahan Filipina

Kultur politik Filipina sangat diwarnai interaksi bangsa asli Filipina dan kebudayaan asing. Bangsa Filipina telah menyerap kebudayaan Cina, Islam, Spanyol, Kristen, Amerika dan Jepang. Masyarakat Filipina adalah masyarakat yang mudah menyerap ide-ide, nilai-nilai, pranata asing yang baru dan kemjudian menjadi bagian dari kebudayaannya sendiri. Namun begitu, unsur asing tersebut akan mendapat seleksi dari masyarakat setempat.

Dalam kultur politik Filipina terdapat pula suatu istilah yang dalam bahasa tagalog yang disebut *kalayakan* yang berarti kemerdekaan. Walau pada masa kini, *kalayakan* mengalami pergeseran arti ke arah modern sekuler, dimana *kalayakan* berarti suatu ungkapan kemerdekaan Filipina dari penjajahan. Dan hal

ini terus berkembang sehingga memiliki arti universal, yaitu kemerdekaan bagi setiap individu atau pada bangsa lain •

Republik Filipina memperoleh pengakuan kemerdekaan dari Amerika Serikat pada tanggal 4 Juli 1946, walaupun para pemimpin negeri itu telah memproklamasikan kemerdekaannya lepas dari Spanyol pada tanggal 2 Juni 1898. Pengakuan kemerdekaan tersebut berdasarkan Act of Congress yang ditandatangani pada tanggal 24 Maret 1934, yang menentukan suatu masa peralihan. Kemerdekaan Filipina berdasarkan ketentuan tersebut akan menjadi efektif pada saat berakhirnya masa peralihan itu. Sesuai dengan Act of Congress tersebut diatas, pada tanggal 14 Mei 1935 telah diratifikasi sebuah konstitusi (Undang-Undang Dasar) yang merupakan “duplikat” dari konstitusi Amerika Serikat. Hal itu berarti bahwa sistem pemerintahan yang dilaksanakan di Filipina serupa dengan yang dianut Amerika Serikat².

Selanjutnya Konstitusi tahun 1935 tersebut beberapa kali mengalami perubahan, yang pada akhirnya diganti dengan sebuah konstitusi baru pada tahun 1973 ketika Presiden Filipina dijabat oleh Ferdinand Marcos. Menurut Konstitusi 1935, sistem pemerintahan yang dijalankan di Filipina adalah *Sistem Pemerintahan Presidensial* sedangkan pada sistem pemerintahan pada Konstitusi 1973 terdapat beberapa lembaga negara yang memegang peranan dalam struktur pemerintahan negara, yaitu:

1. Presiden.
2. Kabinet atau Dewan Menteri.
3. Majelis Nasional (National Assembly)
4. Mahkamah Agung (Supreme Court).

Menurut ahli ketatanegaraan, Prof. Dr. Soemantri, S.H., untuk menyelidiki sistem pemerintahan yang berlaku dan dianut Filipina ada dua hal yang perlu diperhatikan, yaitu sistem pemerintahan sebagaimana secara tetap diatur dalam konstitusinya dan sistem pemerintahan dalam masa peralihan sebagaimana diatur dalam aturan peralihan (*transitory provisions*). berbeda dengan Konstitusi 1935,

² Sri Soemantri, *Sistem Pemerintahan Negara-Negara ASEAN*, Tarsito, Bandung, 1976, hal. 68

menurut Konstitusi 1973 presiden Filipina adalah Kepala Negara (dalam Article VII, Section 1 dikatakan bahwa *The President of the Philippines shall be the symbolic head of state*). Untuk dapat dicalonkan dan dipilih menjadi presiden, maka salah satu syarat yang harus dipenuhi adalah bahwa yang bersangkutan harus menjadi anggota Majelis Nasional. Adapun lembaga yang memilih presiden adalah Majelis Nasional sendiri. Presiden memiliki masa jabatan selama 6 tahun dan ia kebal dari pengaduan-pengaduan. Sebagai kepala negara Republik Filipina, presiden memiliki tugas dan kewajiban sebagai berikut.³

1. Memberikan amanat pada pembukaan sidang-sidang Dewan Nasional (National Assembly).
2. Mengumumkan pemilihan untuk jabatan menteri.
3. Membubarkan Dewan Nasional (National Assembly) dan memerintahkan untuk mengadakan pemilihan umum untuk memilih anggota-anggota Dewan Nasional yang baru.
4. Menerima penyerahan mandat dari Kabinet (Dewan Menteri) yang meletakkan jabatannya.
5. Mengambil sumpah para menteri anggota Kabinet atau pejabat-pejabat tinggi negara lainnya yang diangkat menurut ketentuan hukum yang berlaku.

Setelah diketahui kedudukan dan kekuasaan kabinet dan majelis nasional, dan bagaimanakah hubungan kekuasaan antara presiden Filipina dan Majelis Nasional. Bagaimanakah Dewan Menteri atau Kabinet Filipina terbentuk. Konstitusi Filipina dengan tegas menggariskan bahwa kekuasaan berada di tangan rakyat. Semua pemegang kekuasaan dalam negara memperoleh "kekuasaan" dari rakyat. Kedaulatan diwujudkan melalui pemilihan umum dan dijalankan oleh wakil-wakil rakyat yang duduk dalam majelis Nasional itu.

Sebagaimana telah dikemukakan diatas, wakil-wakil rakyat dalam sistem demokrasi duduk sebagai Majelis Nasional melalui pemilihan umum. Untuk itu perlu adanya partai-partai politik sebagai sarana demokrasi guna mengetahui kehendak rakyat.

³ *Ibid*, hal. 69

Setelah pemilihan umum selesai diselenggarakan, akan dapat diketahui partai politik mana yang menenguasai suara terbanyak secara mutlak kursi dalam majelis nasional tersebut. Atau apabila tidak ada satu partai politikpun yang menguasai suara terbanyak secara mutlak kursi dalam majelis nasional, dapat dipergunakan pegangan, yaitu partai yang memperoleh kursi terbanyak diantara partai-partai politik lainnya. Setelah majelis nasional terbentuk dan keetua lembaga tersebut dipilih, barulah dapat dipilih berturut-turut presiden Filipina, dan perdana menteri. Adanya pemilihan presiden tersebut tentunya pada kosong atau tidaknya kursi kepresidenan. Persoalan ini disebabkan karena masa jabatan presiden adalah enam tahu. Pembentukan kabinet dilakukan melalui pemilihan Perdana Menteri oleh Majelis Nasional

Untuk dapat dipilih sebagai perdana menteri, yang bersangkutan harus menjadi anggota Majelis Nasional. Adanya persyaratan tersebut menunjukkan adanya hubungan antara perdana menteri sebagai kepala pemerintahan dengan Majelis Nasional sebagai badan legislatif. Agara supaya perdana menteri mempunyai dukungan dari Majelis Nasional, maka keputusan pemilihannya harus didasarkan pada suara terbanyak dari seluruh anggota lembaga tersebut. Setelah perdana menteri selaku kepala pemerintahan terpilih, barulah yang bersangkutan menunjuk anggota-anggota Kabinetnya. Dewan Menteri atau kabinet dalam tugas-tugas kenegaraannya bertanggung jawab kepada Majelis Nasional sebagai pemegang kekuasaan legislatif.

Apabila Dewan Menteri atau pemerintahan mendapat mosi tidak percaya dari Majelis Nasional, dengan perkataan lain lembaga negara itu tidak lagi memberikan dukungan kepada Kabinet, maka dengan sendirinya Kabinet harus mengundurkan diri. Sebagai konsekuensinya, penarikan dukungan tersebut harus didikuti dengan adanya pemilihan perdana menteri penggantinya. Dengan demikian, putusan untuk menarik dukungan Majelis Nasional kepada suatu kabinet harus diikuti dalam waktu yang hampir bersamaan dengan putusan yang lain, yaitu pemilihan perdana Menteri baru. Apabila perdana menteri baru telah terpilih, maka hasil pemilihan tersebut harus diumumkan oleh presiden Filipina sesuai dengan tugas dan kewajibannya. Disamping mengumumkan pemilihan

perdana menteri, presiden Filipina juga mempunyai tugas kewajiban menerima pengunduran suatu kabinet.

2.3.1 Pemerintahan dapat membubarkan Majelis Nasional

Diatas telah dikemukakan bahwa kabinet harus bertanggung jawab kepada Majelis Nasional melalui penarik dukungannya. Sebaliknya, Majelis Nasional dapat pula dibubarkan oleh Kabinet atau pemerintah. pembubaran tersebut dilakukan oleh kabinet atau pemerintah. pembubaran tersebut dilakukan oleh presiden Filipina atas usul, nasihat, dan saran-saran dari perdana menteri (pimpinan pemerintahan), yang kemudian memerintahkan diselenggarakannya pemilihan umum.

Walaupun secara konstitusional pembubaran Majelis Nasional dilakukan oleh presiden, tetapi tindakan tersebut hanyalah suatu formalitas belaka. Pada hakikatnya pembubaran Nasional dilakukan dengan tanggung jawab perdana Menteri (kabinet). Melihat kenyataan-kenyataan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa negara Republik Filipina menganut sistem pemerintahan yang dianut berdasarkan konstitusi 1935, yang menganut sistem pemerintahn presidensial.

2.3.2 Kebijakan Pemerintahan dalam Praktek

Konstitusi 1973 mempunyai peraturan peralihan (transitory provisions). Menurut peraturan peralihan tersebut, segera setelah konstitusi yang disusun dalam tahun 1973 diratifikasi, akan dibentuk majelis nasional peralihan (ad interim National Assembly). Majelis Nasional sementara ini akan menjalankan serta melanjutkan tugas-tugas Majelis Nasional yang lama sampai terbentuknya Majelis Nasional baru hasil hasil pemilihan Umum.

Adapun Majelis Nasional sementara tersebut beranggotakan :

1. Pejabat presiden serta wakil presiden Filipina
2. Orang-orang yang telah bertugas sebagai presiden Dewan Konstitusi (konstitusional Convention) tahun 1971.
3. Anggota-anggota senat (senate) dan Dewan Perwakilan Rakyat (house of Representatives). Mereka ini menyampaikan secara tertulis kesediaan mereka untuk duduk dalam Dewan Konstitusi. Pertanyaan tersebut harus disampaikan

kepada Komisi Pemilih (Commission on Elections) dalam waktu 30 hari setelah diratifikasinya konstitusi baru tersebut.

4. Para anggota delegasi dari konstitusi tahun 1971 yang dengan keputusannya yang tegas telah bersedia untuk duduk dalam Majelis Nasional Sementara

Walaupun Majelis Nasional bersifat *sementara*⁴, tetapi lembaga negara tersebut mempunyai kekuasaan yang sama dengan majelis nasional yang tetap (the regular National Assembly). Salah satu tugas Majelis Nasional sementara adalah mengatur perpindahan secara tertib dari sistem pemerintahan presidensial ke sistem pemerintahan parlementer.

Presiden Filipina yang terpilih berdasarkan konstitusi 1935 akan menjadi pejabat presiden setelah diratifikasinya konstitusi 1973. Kekuasaan yang dimilikinya adalah kekuasaan dan prerogatif presiden berdasarkan konstitusi 1935, sementara perdana menteri berdasarkan konstitusi 1973. Kekuasaan itu dijalankan oleh pejabat presiden sampai bersidangnya Majelis Nasional sementara yang akan memilih presiden sementara (the interim president) dan perdana menteri dan kabinet yang sudah bersifat tetap. Akan tetapi, sebagaimana diketahui, dalam masa pemerintahan yang dipimpin oleh presiden Ferdinand Marcos. Republik Filipina belum mempunyai perdana menteri sebagai dikehendaki oleh konstitusi 1973. Pemerintahan langsung dipegang dan dipimpin oleh presiden, secara yang berlaku pada konstitusi 1935, yang secara tidak langsung juga bertugas sebagai perdana menteri (pimpinan kabinet) menurut konstitusi 1973.

2.4 Proses Politik Naiknya Estrada

2.4.1 Situasi Politik Menjelang Pemilu 1998 di Filipina

Dua tahun menjelang pemilihan presiden periode 1998-2004 suasana politik Filipina mulai menghangat. Sejumlah kubu telah menyusun kekuatan dan strategi menandai dimulainya perebutan kursi presiden. Waktu itu telah digelar

⁴ Istilah *sementara* dipergunakan untuk mengikuti istilah dalam bahasa Indonesia untuk Majelis Pemusyawaratan Rakyat Sementara

move politik pro Ramos yang bermaksud menyisiati konstitusi sehingga memungkinkan “Kehendak Rakyat” memilih kembali presiden yang berkuasa⁵

Peta kekuatan politik Filipina dapat digambarkan sebagai berikut. Partai Lakas-NUCD (National Union of Christian Democrats) pimpinan Fidel Ramos merupakan *the Rulling Party*. Ia mendominasi pengaruh terutama di jajaran legislatif (kongres), yaitu sebagian besar dari 250 anggota dan eksekutif (menteri, gubernur dan walikota). Hampir dua tahun silam Lakas berkoalisi dengan partai “*struggle for Philipine Democracy*” yang dalam nama aslinya “Laanang Demokratikong Phlilipino (LDP atau Laban) pimpinan senator Edgardo Angara. Tapi koalisi pecah sehingga Laban kembali pada posisi semula sebagai partai oposisi terbesar. Dalam pertarungan sekarang hingga pemilu 1998 nanti sudah bisa diperkirakan Laban akan menjagokan Edgardo Angara.

Diluar dua kekuatan tadi masih ada beberapa partai lebih kecil yang pada umumnya berdiri di seberang Fidel Ramos. Misalnya saja Nationalist People Coalition (NPC), People’s Reform Party, Partidong Masang Philipino (PMP) atau partai rakyat Filipina, kilusang bagong Lipunan (KBL) atau gerakan Masyarakat Baru, beberapa diantaranya telah berusaha dekat dengan kandidat pemenang pemilu 1998 seperti Miriam Defensor Santiago (PRM), Joseph Estrada (PMP), Imelda Marcos (KBL). Sebenarnya masih terdapat calon lain yang dapat disebut media massa yaitu Gloria Macapagal Arroyo, Jose de Venecia, Leticia Ramos Shahani. Ketiga orang itu dikenal punya hubungan amat dekat dengan sang presiden atau tergabung dengan dalam kubu Lakas-NUCD. Maka bila dipetakan secara ringkas kubunya cuma dua, pro status quo dan oposisi.

Dalam bulan Juni-Juli pertarungan semakin terbuka. Misanyal adalah move yang dilakukan oleh sejumlah senator Lakas yakni Pedro Ramualdo, Raul Gonzales, Mariano Tajon. Kelompok ini mengincar pasal XVII konstitusi 1987 yang memberi peluang adanya perubahan (Amandements or Revisions) Undang-undang Dasar. Didalam konstitusi tersebut disebutkan tiga jalan yakni :

1. Melalui konggres dengan tiga perempat anggota,
2. Sebuah konvensi konstitusional, atau

⁵ *Suara Pembaharuan*, 12 juni 1996

Digital Repository Universitas Jember

3. Inisiatif rakyat.

Jalan ketiga inilah yang tengah diperjuangkan kubu pro-status quo.

Tokoh yang bakal menjadi pesaing kuat Fidel Ramos adalah wakilnya sendiri, Joseph Estrada. Ia disebut sebagai kandidat presiden terjadi dalam peresmian partai barunya, partai rakyat (Partidong Masang Philipino/ PMP) di San Juan. Joseph Estrada terpilih sebagai calon terkuat partai oposisi terbesar dalam pemilihan presiden tahun 1998. menurut Luis V. Teodoro⁶ bila kesehatannya dan ketenarannya bagus dalam dua tahun depan maka dialah kandidat paling hebat, sebab ketenarannya adalah uinsur paling genting dalam politik Filipina. Semakin populer seseorang semakin dekat ia dengan politik (kekuasaan). Joseph Estrada menyatakan bahwa ia adalah pilihan rakyat untuk menggantikan presiden Fidel Ramos, pernyataannya ini dilatarbelakangi oleh karir sebelum aktor film yang sering memainkan peranan sebagai pembela rakyat kecil dan miskin dan hal ini berlangsung selama 10 tahun.⁷ Sebuag jajak pendapat menempatkan Joseph Estrada jauh diatas ketimbang Fidel Ramos, ia meraih angka 26 % sedangkan Fidel Ramos Cuma mendapatkan 8 %.⁸ Asia Research Organization (Gallup) pada bulan Mei juga melakukan survey terhadap masyarakat dengan hasil, jika pemilu diadakan pada bulan mei maka hasilnya adalah angka tertinggi akan diraih oleh Joseph Estrada 33 %, Gloria Macapagal Arroyo 25 %, Miriam Defensor Santiaghoo 22 %, Edgardo Angara 4 %, Jose de Venecia 3 %, dan tidak tahu 13 %⁹ menurut survey ini faktor terbesar pengatrol popularitas Joseph Estrada ternyata jabatannya sebagai ketua komisi presiden anti kejahatan (PACC).

Joseph Estrada kini berada satu baris dengan kelompok oposisi. Mereka telah menyatukan diri dalam Manifesto for Democracy menentang perubahan UUD. Di jajaran senat, Joseph Estrada mendapat dukungan 17 orang dari seluruh 24 senator.¹⁰ Mereka menyatakan “tidak” bagi perubahan konstitusi. Uniknya,

⁶ *Today*, 4 Mei 1996

⁷ *Kompas*, 4 Januari 1998

⁸ *Kompas*, 6 Juni 1996

⁹ *Asiaweek*, 14 Juni 1996

¹⁰ *Philippines Free Press*, 8 Juni 1996

Digital Repository Universitas Jember

diantara mereka terdapat orang-orang terdekat Fidel Ramos antara lain, Jose de Venecia dan Leticia Ramos Shahani, adik perempuannya.

Namun ada beberapa faktor yang menentukan keberhasilan para kandidat yaitu budaya politik panutan model tuan-hamba (patron Client) yang masih cukup dominan serta faktor uang. Uang memegang peranan sangat penting akibat tingginya angka kemiskinan yang memungkinkan terjadinya transaksi suara untuk memenangkan kandidat tertentu.

2.4.2 Masa Kampanye dan Pemilu

Kampanye Pemilu di Filipina berlangsung selama tiga bulan. Kampanye pemilu ini adalah kampanye pemilu untuk memilih seorang presiden, wakil presiden, senator, anggota parlemen, para pejabat daerah. kampanye di Filipina diwarnai dengan hiburan yang menarik dengan panggung terbuka bagi rakyat Filipina maupun wisatawan, karena pemilu kali ini untuk kedua kalinya sejak tahun 1969, rakyat Filipina dapat menjatuhkan pilihannya secara bebas.¹¹ Kebebasan rakyat dihambat dan dibungkam setelah Ferdinand Marcos berkuasa (1965) dan baru dibuka secara paksa pada tahun 1988 dengan revolusi *people's power* dan ditandai dengan jatuhnya Marcos. Pemilu tahun 1992 merupakan kesempatan pertama, rakyat secara bebas memilih presiden mereka. Ketika itu maju delapan kandidat presiden dan pemilu dimenangkan oleh Fidel Ramos yang menurut pernyataan komisi pemilu (comelec) berlangsung secara curang¹².

Dalam pemilu kali ini akan membuat demokrasi semakin kuat di Filipina dan menempatkan negara itu di garda depan kubu negara demokratis yang tengah berkembang di kawasan Asia tenggara. Dalam pemilu 1998 ini muncul sebelas kandidat presiden, satu orang diantaranya mengundurkan diri yaitu Imelda Marcos. Mereka berasal dari berbagai latar belakang. Kesepuluh kandidat presiden lainnya adalah¹³ :

1. Joseph Estrada dari partai LAMMP
2. José de Venecia dari Partai Lakas

¹¹ *Kompas*, 13 Mei 1998

¹² *Kompas*, 9 Mei 1998

¹³ *EIU Country Report 3rd quarter*, 1998.

Digital Repository Universitas Jember

3. Raul Roco dari Partai Aksyen Demokratiko
4. Emilio Osmena dari partai Progressive movement of Development of Initiatives,
5. Alfredo Lim dari Liberal Party
6. Renato de Villa dari Partidopara Demokratikong Reporma,
7. Miriam Defensor santiago dari people's reform party
8. Juan Ponce Enrille dari Partai Independent
9. Santiago Dumlaui dari Kilusan para sa Pambansang Pagpapibago
10. Manuel Morato dari Decent Nation Party

Kampanye pemilu kali ini semakin ramai dengan adanya 10 kandidat dalam kampanyenya mengajukan program-program untuk mempengaruhi masyarakat agar memilihnya. Joseph Estrada misalnya mengangkat isu kemiskinan dalam kampanyenya. Ia berniat akan mengajukan pertumbuhan ekonomi dan pengembangan wilayah pedesaan, pemberantasan korupsi dan penyusunan. Pada waktu kampanye Joseph Estrada rajin membawa layar tancap ke berbagai daerah untuk mempertontonkan film-filmnya.

Raul roco mengangkat isu tentang hak-hak kaum wanita yang perlu untuk diperjuangkan. Sedang Jose de Venecia mengangkat isu tentang pembangunan ekonomi dengan mengajukan kebijaksanaan ekonomi yang dimulai Ramos. Lain lagi dengan Alfredo Lim yang mengangkat isu tentang pemerintahan yang bersih dari korupsi dan penjahat, untuk itu perlu tindakan yang tegas.¹⁴ Daily Inquirer menyebutkan bahwa apa yang terjadi di Filipina saat itu tak ubahnya seperti pentas paling elok dan paling akbar di dunia. Karena merupakan sirkus politik yang sarat dengan pelawak, para politikuss yang berkelakuan keterlaluan dan para politisi yang melakukan akrobat dengan melompat dari partai satu ke partai yang lain.¹⁵

Kampanye di Filipina terakhir tanggal 9 Mei 1998, semua kandidat masih memanfaatkan hari terakhir untuk melakukan kampanye, kecuali Joseph Estrada yang mengakhiri kampanye tanggal 8 Mei dengan mengadakan misa Syukur.

¹⁴ *Kompas*, 12 Mei 1998

¹⁵ *Kompas*, 13 Mei 1998

Sementara itu kandidat presiden Imelda Marcos mengundurkan diri pada tanggal 8 Mei 1998. Ia menyatakan secara resmi dengan memberikan suara partainya, Kilusan Bagong Lipunan (Gerakan Masyarakat Baru) kepada Joseph Estrada. Dalam kesempatan yang sama Imelda menemui Presiden Ramos untuk meminta agar jenazah suaminya, Ferdinand Marcos yang meninggal tahun 1989 diijinkan dimakamkan di taman makam pahlawan (TMP). Saat itu jenazah Marcos masih di semayamkan di kampung halamannya, Laoag, Ilocos Norte, Filipina Utara. Akan tetapi Ramos tidak memberikan jawaban terhadap permintaan Imelda tersebut.¹⁶

2.4.3 Pelaksanaan Pemilu

Pemilu di Filipina mempunyai 174.420 tempat pemungutan suara (TPS) yang tersebar di seluruh wilayah Filipina. dan dari total 35 juta pemilih merupakan pemilih pemula, mereka begitu antusias menggunakan haknya. Karena di dalam pemilu ini selain memilih presiden juga wakil presiden dengan 9 kandidat, 12 senator, 52 anggota parlemen wakil partai, 207 anggota House of Representatives, 78 Gubernur (78 wakilnya), serta 722 anggota dewan propinsi, 80 wali kota praja (80 wakilnya), dan 12.240 councilor kota¹⁷

Pemilu ini pun tergolong aman karena hampir tidak ada korban yang meninggal jika dibandingkan dengan pemilu-pemilu pada tahun-tahun sebelumnya, hanya sekali saja dalam pemilu ini terjadi aksi protes yang cukup menonjol dilakukan oleh masyarakat. dalam aksi ini mereka menuntut agar mendiskualifikasi kandidat pengganti Ny. Corazon Aquino. Imelda Marcos, yakni Vic Milora yang dianggap mencari keuntungannya sendiri dengan mengalihkan suara Gerakan Masyarakat Baru (kilusang Bagong Lipunan, Partainya Imelda) kepada Estrad.¹⁸

2.4.4 Penghitungan Suara Hasil Pemilu

Ketua Komisi Pemilihan Umum (Comission on Elerctions/Comelec) Bernardo PRI Pardo menyatakan bahwa posisi Joseph Estrada pada pemilu kali ini sudah berada "diatas angin" dibandingkan dengan para kandidat presden

¹⁶ *Kompas*, 10 Mei 1998

¹⁷ *Kompas*, 13 Mei 1998

¹⁸ *Kompas* 12 Mei 1998

Digital Repository Universitas Jember

lainnya. pada penghitungan surasebanyak 70,31 % dari total jumlah suara yang telah dihitung, Joseph Estrada telah mengantongi sedikitnya 37,3% lebih tinggi dibandingkan dengan Jose de Venecia Jr yang hanya meraih 15,3%

Jose de Venecia Jr yang sebelumnya Keetua parlemen dan berbendera Lakas-NUCD (National Uniopn of Christian Democrats) merupakan saingan terdekat Joseph Estrada mengakui ia besar kemungkinannya akan kalah. Senator Raul Roco juga mengatakan hal yang sama, dan ia menduduki tempat ketiga setelah Joseph Estrada dan Venecia. Kandidat lainnya yang mengaku kalah adalah Juan Ponce Enrille, Manuel Morato, Renato de Villa, Alfredo Lim dan Lito Osmena.

Sementara itu, Miriam Defensor Santiago yang daam pemilu 1992 sebagai peringkat kedua setelah Ramos, menyatakan tidak puas terhadap hasil sementara Pemilu. Rassa ketidakpuasan ini juga dikemukakan Fransisco Tatad. Kedua kandidat presiden itu menuduh Joseph Estrada menjalankan praktek jual beli suara.¹⁹ namun opada akhirnya hasilpemilu yang menentukan, siapakah yang berhak menjadi presiden Filipina. hasil pemilu yang semula akan diumumkan pada 12 Juni ternyata dipercepat, pada tanggal 27 Mei pengumuman resmi diumumkan konggres. Suara dan kehendak rakyat tidak dapat dibendung. Itulah yang tercermin dari terpilihnya mantan bintang film Joseph Estrada sebagai presiden ke-13 Filipina.

Joseph Estrada menurut hasil penghitungan suara resmi mengumpulkan 10.722.295 suara (39,9%) dari seluruh suara yang dihitung. Jumlah pemilih seluruhnya adalah 34 juta suara. Sementara itu jago partai yang berkuasa (Lakas-NUCD) Jose de Venecia hanya mampu mengumpulkan 4.268.483 suara (15,9%). Kandidat lainya seperti Raul Roco memperoleh 3.720.212 suara (13,8%) Emilio Osmena memperoleh 3.347.631 suara (12,4%), Alfredo Lim memperoleh 2.344.362 suara (8,7%), Renato de Villa mendapat 1.308.352 suara (4,9%), Miriam Santiago mendapat 797.206 suara (3,0%), Juan Ponce Enrile memperoleh 343.139 suara (1,3%), Santiago Dumlao mendapat 32.212 suara

¹⁹ *Kompas*, 19 Mei 1998

(0,1%0, dan Manual Morato memperoleh 18.644 suara (0,1%) dari keseluruhan pemilih.²⁰

Kemenangan Joseph Estrada ini diikuti oleh Gloria Arroyo, yang akan menjadi wanita pertama Wakil Presiden Filipina. Putri mantan presiden Diosdado Macapagal mampu mengumpulkan 47% suara. Dengan terpilihnya Joseph Estrada yang nama aslinya Joseph Marcelo Ejercito, kondisi ini sekaligus juga menisbikan segala macam penilaian yang ditujukan kepadanya.

2.4.5 Janji Kampanye Joseph Estrada

Dalam kampanye pemilu presiden, tiap kandidat menagajukan suatu program yang akan dilaksanakan jika ia terpilih menjadi presiden. Hal ini juga berlaku bagi Joseph Estrada. Program-program yang ditawarkan Joseph Estrada adalah pemerintahannya akan memfokuskan diri pada pemberantasan korupsi dan penyuapan, memajukan pertumbuhan ekonomi dan pengembangan wilayah pedesaan. Ia juga bertekad untuk menumpas penculikan yang menuntut uang tebusan dalam tempo enam bulan.²¹

Estrada tumbuh dikawasan miskin, San Juan, luar kota Manila. Mungkin hal ini juga yang menyangkut mempengaruhi penyusunan program yang ia tawarkan. Erap menempatkan program ekonomi sebagai prioritas pertama, melanjutkan upaya presiden Fidel Ramos dalam usaha menyelamatkan Filipina dari sergapan krisis moneter. Sebagai prioritas selanjutnya yaitu memperbaiki sepertiga dari rakyat Filipina yang masih dilanda kemiskinan. Namun pada dasarnya apa yang menjadi program kampanye estrada sebenarnya merupakan bentuk implementasi dari pada visi dan misi partai, LAMMP sebagai partai, yang mendukung Estrada untuk menjadi kandidat presiden Filipina memiliki beberapa program kerja yang dijadikan sebagai acuan bagi estrada untuk menyusun program kerjanya dalam pemilihan presiden di Filipina. Oleh karena Estrada memiliki platform dalam menjalankan pemerintahannya nantinya yaitu dengan menjanjikan²²:

²⁰ *EIU Country Report 3rd quarter* 1988

²¹ *Kompas*, 23 Desember 1997

²² <http://www.gov.ph>

Digital Repository Universitas Jember

1. Akan bertindak tegas terhadap kolusi dan korupsi yang terjadi dalam pemerintahan dan akan memastikan bahwa yang berkhianat akan dihukum berat, tanpa memandang koneksi ataupun hubungan keluarga yang dimiliki oleh si pelaku.
2. Menyelesaikan sekitar 2,500 kasus yang masih menggantung yang berkaitan dengan kolusi dan korupsi hingga tahun 2004
3. Pelarangan terhadap penunjukan secara politis bagi pejabat yang akan duduk di kabinet
4. Memotong pelanggaran COA hingga 80% melalui reformasi dalam penyitaan dan pengambilalihan
5. Menghentikan semua penyitaan dan pengambilalihan yang dilakukan melalui DBM
6. Penetapan RA 6713 yang mengharuskan pegawai pemerintahan untuk segera memenuhi panggilan dalam 15 hari
7. Penyederhanaan aturan dan peraturan birokratis
8. Demiliterisasi dari birokrasi

Estrada juga menjanjikan akan menyelesaikan persoalan perumahan kumuh dan kepadatan melalui projek-projek perumahan rakyat, sistem transportasi yang menggunakan jalur, reformasi lalu lintas, dan kerangka kerja nasional bagi pembangunan habitat manusia dengan :

1. Membangun transportasi jalur yang menghubungkan mega-Cebu dan mega-Davao
2. penyediaan 1.2 juta perumahan baru bagi masyarakat miskin
3. peningkatan pembiayaan panti-panti jompodari 1.2% hingga 5% seluruh pembiayaan tempat-tempat perlindungan

Estrada berjanji akan melindungi hak dari 28 juta anak-anak Filipina, dan untuk memastikan bahwa mereka memiliki akses terhadap pendidikan yang berkualitas, pelayanan kesehatan dan program-program pangan. Penyalahgunaan obat bius, dan, eksploitasi, kecacatan dan buta huruf akan ditangani secara agresif. Dan akan

Digital Repository Universitas Jember

menciptakan suatu lingkungan yang kondusif bagi berkembangnya kesenian dan kebudayaan filipina, dengan :

1. meningkatkan pendanaan pendidikan hingga 20% dari pendanaan nasional
2. mengurangi ukuran murid dalam kelas hingga maksimum hanya boleh terisi 30
3. pendidikan prasekolah gratis bagi sekitar 2 juta anak umur 4-6 tahun
4. penyediaan 400,000 computer bagi sekolah umum
5. pencapaian 100% partisipasi dalam kesempatan mengenyam pendidikan sekolah dasar
6. meningkatkan angka kemampuan membaca menjadi 98% pada tahun 2000
7. pendidikan bagi 70% semua anak penderita cacat yang berumur 10-19 tahun
8. meningkatkan tunjangan kesehatan 5% dari seluruh pendanaan secara nasional
9. pada tahun 2004, semua keluarga Filipina seharusnya semua keluarga di filipina hanya membutuhkan waktu 10 perjalanan untuk sampai ke fasilitas pelayanan kesehatan yang terdekat
10. mengurangi angka penderita TBC menjadi hanya 2 orang per 1.000 penduduk
11. pengurangan angka penderita cataract hingga 300,000 kasus pada 2004
12. cacar air tidak lagi akan menjadi penyebab kematian terbesar diantara anak-anak
13. pengurangan angka pertumbuhan penduduk menjadi 1.8% pertahun

Estrada berjanji tidak akan mentolerir tindak kejahatan dan kelompok-kelompoknya. Estrada akan mengumumkan perang terhadap obat bius dan akan membersihkan badan-badan hukum. Reformasi secara menyeluruh terhadap sistem hukum. Fungsi kepolisian akan dikembalikan unit-unit pemerintahan lokal. Keamanan dan perdamaian dalam masyarakat kita, jalan-jalan dan rumah-rumah kami akan dibersihkan kembali, oleh karena itu ia bertekad untuk melakukan beberapa hal yaitu :

1. pemberantasan tindak kejahatan lingkungan perumahan dengan melakukan patroli dan penggalakan sistem pengamanan swakarsa
2. 85% anggota kepolisian akan lebih diaktifkan di jalanan daripada di kantor
3. pendirian jaringan informasi kejahatan di 77 propinsi

4. menghukum aparat yang terlibat kejahatan
5. meningkatkan gaji dasar aparat
6. perbaikan sarana penjara dan reformasi pengaturannya
7. program-program kemitraan antara laboratorium kejahatan dengan 16 universitas negeri
8. melipatgandakan jumlah polisi wanita pada tahun 1999
9. Reformasi dalam sistem hukum
10. Penyediaan unit perlindungan ibu dan anak di 1500 rumah sakit swasta dan umum dan di semua kantor kepolisian

Selama waktu kampanye, program atau janji-janji itulah yang selalu Estrada sampaikan kepada pendukungnya di berbagai pelosok daerah di Filipina, dan dengan janji-janjinya pula Estrada banyak mendapatkan dukungan dari rakyat Filipina terutama kaum miskin Filipina

2.4.6 Faktor-faktor Penentu Kemenangan Joseph Estrada

Keberhasilan Joseph Estrada menduduki kepresidenan bukanlah strategi, tetapi hal tersebut memang sudah diperhitungkan dan dipersiapkan sejak lama. pemunculan Joseph Estrada sebagai tokoh anti-hero dan anti intelektualisme merupakan fenomena baru yang cukup menarik dalam sejarah politik Filipina. adapun faktor-faktor yang atau yang ikut menentukan keberhasilan Joseph Estrada antara lain dalam diri Joseph Estrada sendiri, kharisma, popularitas dan kecerdikannya. Joseph Estrada berpihak pada kaum papa (miskin). Ia mengawali sejak ia menjalani kariernya di dunia film. Ia menggambarkan dirinya sebagai pahlawan di jalanan yang membela orang miskin. Hal ini mungkin membawa pengaruh psikologis terhadap massa. Apalagi sewaktu Ia menjabat sebagai Komisi Anti Kejahatan Kepresidenan, ia bertindak cukup tegas. Berbagai aksi kejahatan berhasil ditumpasnya, sehingga ia menjadi sangat populer dimata masyarakat. masyarakat sendiri sudah mendambakan sang pemimpin yang bersih, membela rakyat kecil, dan hal ini telah dimiliki oleh Joseph Estrada. Dengan tegas dan tanpa ragu, Erap bertekad untuk menghapus praktek kolusi, korupsi dan nepotisme juga berpendapat bahwa:

Digital Repository Universitas Jember

“Praktek korupsi, kolusi dan nepotisme justeru terjadi paling banyak di jajaran orang berseragam. Sebanyak 52 % diantaranya terjadi di dalam tubuh kepolisian dimana para oknum suka berkongkalikong dengan para penjahat.”²³

Sehingga dengan pernyataannya itu membuat masyarakat Filipina kagum, terlebih ketika Erap dengan berani membawa seorang Jenderal dan perwira menengah, Kol (pol) Reynaldo Berroya yang masih merupakan saudaranya sendiri, ke pengadilan.²⁴ Secara psikologis rakyat Filipina merasa telah menemukan seseorang calon pemimpin yang akan membawa perubahan bagi Filipina nantinya, sementara itu untuk memperbaiki tingkap hidup kaum miskin yang menjadi prioritasnya, Joseph Estrada mencanangkan program sepuluh sasaran yang akan dimplementasikan pada 100 hari pertama masa pemerintahannya nanti, program ini terdiri dari menurunkan tingkat suku bunga, harga sembilan bahan pokok, menciptakan lapangan kerja seluas mungkin, menurunkan tingkat belanja pemerintah, menghapus kebiasaan “uang suap,” restrukturasi pajak ketentuan pajak. Mendayagunakan pajak, dan terakhir privatisasi sejumlah perusahaan negara di bidang elektronika dan media massa²⁵ dimana program tersebut juga merupakan visi dari LAMMP. karena semenjak pemerintahan Marcos rakyat merasa diperlakukan dengan sewenang-wenang. Bahkan sampai pemerintahan Fidel Ramos pun masih ada penyimpangan yang cukup besar antara Ramos sendiri dengan perusahaan-perusahaan swasta. Semua hal itu membuat hati rakyat kecil dibodohi dan oleh karenanya mereka bertekad untuk bangkit dengan berpartisipasi melalui pemilu untuk ikut menentukan masa depan negaranya.

Tekad masyarakat yang bulat itu terbukti dengan kemenangan Joseph Estrada. Sedangkan pihak Konferensi Uskup Katholik Filipina (CBCP) telah menyerukan kepada umatnya melalui surat gembalanya agar mereka tidak memilih seorang kandidat yang penjudi, pemabuk dan suka perempuan. Hal ini sangat merugikan bagi kubu Joseph Estrada dan juga bagi demokrasi Filipina karena keberadaan Konferensi Uskup Katholik Filipina (CBCP) dalam

²³ *Kompas*, 1 Juni 1998

²⁴ *Ibid.*

²⁵ *Kompas*, 2 Juni 1998

pemerintahan-pemerintahan sebelumnya sangatlah berpengaruh dalam masyarakat Filipina karena fungsinya sebagai kekuatan moral di Filipina. misalnya pada era Marcos, tekanan gereja yang kuat telah dapat menjadi salah satu unsur dicabutnya UU Darurat Perang pada awal tahun 1981. Peranan gereja di Filipina sebagai oposisi tidak resmi terhadap rezim Marcos pada saat itu merupakan faktor penting dalam dinamika sistem politik, dengan dampak ganda sebagai pengimbang sistem politik formal atau merusak mekanisme yang tidak berjalan sempurna. Faktor lain yang ikut mempengaruhi kemenangan Joseph Estrada yaitu pengunduran diri Ny. Imelda Marcos dan memberikan suara partainya Kilusang Bagong Lipunan kepada Wakil Presiden Joseph Estrada. Hal ini sempat mengundang aksi protes selama pemilu berlangsung. Dengan demikian penyaluran suara partai Gerakan Masyarakat Baru ikut mempengaruhi kemenangan Estrada.

Faktor selanjutnya yaitu orang-orang yang berada di belakang Joseph Estrada yang mempunyai peran penting dalam pemilu. Mereka yang mendukung Joseph Estrada adalah bintang film, oposisi ekstrim, aktifis pelayan masyarakat, dan yang terpenting peran dari pada teman bisnisnya Joseph Estrada yaitu Ronaldo Zamora, sekretaris eksekutif Joseph Estrada, dan Roni seorang veteran politik dan banking Presiden Marcos, Eduardo Cojuangco adalah orang kaya pemilik perusahaan makanan dan minuman raksasa. Dia yang menyangand sebagian dana pemilu untuk Joseph Estrada²⁶

²⁶ *FEER*, 14 Mei 1998 Hlm. 18 & EUI Country Report 3rd quarter 1988 Hlm. 11

BAB III

SEJARAH GERAKAN MASSA DI FILIPINA

3.1 Gerakan Massa I di Filipina masa Marcos

Penyebab jatuhnya Marcos sebenarnya tidak terlepas dari kepemimpinannya yang cenderung otoriter di dalam menjalankan pemerintahannya. Selama Marcos berkuasa, masyarakat Filipina hidup dalam kondisi represif hal ini tercipta karena pemerintah kurang mengakomodir semua kepentingan rakyat, birokrasi perintah Filipina dibawah pemerintahan Marcos sarat dengan kolusi dan nepotisme ini terbukti dengan adanya perusahaan-perusahaan vital dimiliki oleh Marcos dan kroni-kroninya. Rakyat Filipina memandang hal itu merupakan suatu hal yang tidak adil bagi mereka tetapi mereka tidak bisa berbuat banyak karena militer sangat mendukung kebijakan pemerintah pada saat itu. Sehingga aspirasi rakyat Filipina dapat dikatakan telah mati pada masa itu, pada sisi lain tekanan pemerintah yang otoriter ini ternyata telah menciptakan kebencian yang mendalam pada setiap diri rakyat Filipina, banyak tokoh masyarakat dari kalangan oposisi yang diasingkan ke luar negeri. hal itulah yang menyebabkan kebencian masyarakat Filipina semakin memuncak. Namun hal ini mencapai puncaknya terutama setelah peristiwa pembunuhan terhadap bekas senator Benigno Aquino. Peristiwa pembunuhan ini terjadi disaat Benigno Aquino menginjakkan kakinya untuk pertama kalinya di bandara Manila, pada tanggal 21 Agustus 1983, setelah dibebaskan dari tahanan sejak awal tahun 1980-an. meskipun penyelidikan resmi mengungkapkan penembaknya adalah seseorang bernama Rolando Galman, namun pihak oposisi yang menuduh Presiden Marcos dan para pemimpin militer yang mendukungnya berada dibalik peristiwa pembunuhan tersebut. hal ini ternyata telah menjadi bumerang, disamping juga telah membangkitkan kemarahan serta perasaan frustrasi masyarakat. kondisi ini semakin lebih buruk terutama pada masa itu pemerintahan Marcos memberlakukan *Undang-Undang Darurat Perang* (Martial Law), sejak tahun 1972. Adanya undang-undang ini telah memberikan kekuasaan yang besar

bagi pemerintahan Marcos untuk mengambil segala tindakan yang dianggap perlu guna menyelamatkan Filipina dari kehancuran. Namun kekuasaan tersebut menurut oposisi justru dipergunakan Marcos untuk melestarikan kekuasaannya. Marcos menangkap serta memenjarakan lawan-lawan politiknya, sejak berlakunya undang-undang keadaan darurat tersebut, banyak lawan politik Marcos yang mengalami siksaan dan intimidasi sehingga tidak kurang diantara tokoh-tokoh oposisi tersebut yang terpaksa menyingkir atau disingkirkan keluar dari Filipina. Gerakan oposisi semakin seru, dan tidak mengendur di masa undang-undang keadaan darurat. Sejalan dengan perkembangan politik yang runyam, ekonomi Filipinapun mengalami kemerosotan drastis.

Dengan tewasnya Benigno S. Aquino kaum oposisi memperoleh momentum yang tepat untuk melancarkan perlawanan yang lebih keras lagi guna mengakhiri pemerintahan Marcos. Pihak pimpinan gereja Katholik negeri itu turut mendukung oposisi dan secara langsung berhadapan dengan rezim Marcos. Demonstrasi di jalan-jalan kota Manila dan kota-kota lainnya yang dilakukan oleh massa rakyat Filipina makin sering berlangsung terjadi di kota Manila dan kota-kota lainnya di Filipina. Beberapa minggu setelah pembunuhan tersebut rakyat Filipina menjalankan aksi protes, gelombang demonstrasi yang menyusul peristiwa pembunuhan terhadap Aquino lebih besar dan berlangsung lebih lama dari pada demonstrasi-demonstrasi sebelumnya itu, protes tersebut bersamaan dengan krisis ekonomi. Pemberontakan yang makin meluas semakin memperburuk masa depan dari rezim yang berkuasa, hal ini menimbulkan terjadinya perebutan kekuasaan atau suksesi. Posisi Marcos sebagai orang nomer satu di Filipina menjadi semakin terancam. Ancaman kehilangan posisi itulah yang mendorong Marcos untuk mengambil keputusan-keputusan yang dinilai sangat diktator dan kurang memperhatikan hak asasi manusia. Tindakan Marcos yang dianggap tidak adil dan sewenang-wenang, sebenarnya adalah cerminan dari tidak adanya konstitusi yang tegas dan jelas untuk mengatur pemerintahan Marcos, oleh karena itu Marcos tidak pernah merasa terikat dengan konstitusi. Marcos dapat mengadakan amandemen terhadap undang-undang sesuai dengan keinginannya sendiri. Seperti dalam upaya mempertimbangkan pemilu bila

Digital Repository Universitas Jember

keadaan memang memaksa, maka Marcos dapat mengadakan amandemen konstitusi, atau mengubah tanggal pemilihan presiden. Marcos juga mengadakan plebisit nasional guna meminta persetujuan rakyat tentang pelaksanaan pemilihan umum, karena konstitusi tidak mengizinkan untuk melaksanakan pemilihan umum tepat pada waktunya. Atau apabila presiden terlalu dengan ini masih ada cara lain, presiden untuk sementara dapat mengundurkan diri, sesuai dengan konstitusi jabatan presiden dapat dialihkan pada ketua parlemen. Ketua Batasang Pambansa kemudian harus mengadakan pemilihan presiden paling kurang 60 hari setelah pengunduran diri. Setelah itu tidak ada ketentuan bagi seorang bekas presiden yang mengundurkan diri untuk tidak mencalonkan diri lagi.¹

Menghadapi kondisi dalam negeri yang demikian serta ditambah dengan resolusi dari konggres Amerika Serikat yang menyerukan agar diselenggarakan suatu pemilihan yang bebas dan jujur. Pemerintahan Marcos kemudian memutuskan untuk mengadakan pemungutan suara guna memilih dewan Nasional (*Batasang Pambansa*) pada bulan Mei 1984. Pemilu tersebut diselenggarakan dibawah pengawasan NAMFREL (*National Citizens Movement For Free Election*) suatu gerakan sukarela yang independen serta diliput oleh berbagai media asing. Namun demikian pada pelaksanaan pemilu tersebut sering dijumpai adanya pelanggaran, dalam keadaan yang seperti ini pihak oposisi masih mampu meraih kemenangan pada awal-awal perhitungan suara baik di Metro Manila maupun di Cebu. Walaupun akhirnya harus menerima kemenangan di pihak Marcos (KBL). Pengalaman yang diperoleh oleh pihak oposisi dalam pemilu tahun 1984, khususnya melalui mobilisasi NAMFREL merupakan pra-kondisi yang sangat penting untuk pemilihan presiden tahun 1986. Diantara pemilu Batasang pada tahun 1984 sampai akhir tahun 1985, kaum oposisi tetap melanjutkan perjuangannya melalui demonstrasi-demonstras, pemogokan-pemogokan dengan dukungan yang terus berkembang terhadap gerilya NPA. Mereka terutama menentang diberlakukannya kembali undang-undang darurat perang.

¹ *Harian Suara Merdeka*, 13 Agustus 1985

Digital Repository Universitas Jember

Dengan terbunuhnya Benigno Aquino, organisasi-organisasi yang berposisi tumbuh dengan pesat, terutama sebagai reaksi atas peristiwa tersebut. seiring dengan itu, konstelasi politik Filipina di kubu oposisi yang terpecah belah juga mengalami perkembangan yang cepat selama 2 tahun setelah peristiwa tersebut. kelompok oposisi ekstrim kiri yang lebih terorganisir dan memiliki sarana yang memadai, menggunakan kesempatan ini untuk mengorganisir demonstrasi-demonstrasi besar menentang pemerintah. demonstrasi ini dikerahkan oleh partai komunis Filipina melalui taktik front persatuan, seperti Democratic National. Sedangkan kelompok oposisi legal, masih terlibat dalam perbedaan-perbedaan yang tajam dan bersaing satu dengan yang lainnya. keadaan ini tentu saja akan menguntungkan KBL dan kelompok ekstrim kiri hingga tingkatan tertentu. Oleh karena itu, mereka berusaha untuk bersatu jika tujuan mereka sama yakni mengadakan perubahan secara damai di Filipina.

Perpecahan yang terjadi pada kelompok oposisi berawal sejak pemilu 7 Nopember 1978 yang memilih 165 orang anggota Batasang Pambansa peralihan (Interim Batasang Pambansa). Sebab pemilihan yang dilaksanakan di bawah keadaan darurat perang mustahil akan berlangsung bebas dan bersih sesuai dengan apa yang didambakan pihak oposisi tanpa suatu pers yang bebas. Mereka cenderung untuk memboikot pemungutan suara agar menjadi kacau.² Namun nampaknya, pihak oposisi menyadari akan tanggung jawab yang diberikan rakyat kepada mereka. Kemudian mereka merubah pendirian, untuk berpartisipasi dalam pemilu walaupun kesempatan untuk menang sangat kecil.

Aquino tampil sebagai calon dari pihak oposisi untuk Metro Manila, Aquino tampil tidak atas nama partai Liberal akan tetapi atas nama partai yang baru. Sejak saat itu lahir partai Lakasang bayan (people power) yang disingkat dengan Laban (perjuangan) dibawah pimpinan Lorenzo Tananda³. Pada pemilu 1978 pihak oposisi harus menerima kekalahan yang diberikan oleh Imelda di Metro Manila dengan perbandingan hasil kemenangan 21-20 untuk KBL.⁴ Pihak

² Kustigar Nadaek & Atmadji, *Revolusi Damai, Rekaman Kemelut di Filipina*, Bina Ilmu, Surabaya, hal.63

³ *Ibid*

⁴ *Ibid*, hal. 66

Digital Repository Universitas Jember

oposisi telah menuduh kecurangan besar-besaran yang dilakukan oleh KBL. Sejak itu, kekuatan oposisi semakin meningkat. Perjuangan menentang rejim diktator tidak lagi tercermin dalam pertarungan antara Aquino dengan Marcos secara pribadi, akan tetapi antara *people power* dengan rejim diktator.⁵ Dalam pemilu 1984, kelompok oposisi terpecah menjadi dua bagian. Kelompok yang pertama bersedia ikut dalam pemilu, sedangkan kelompok yang lain bermaksud untuk memboikot. Menurut mereka, ikut serta dalam pemilu baik sebagai calon maupun sebagai pemilih sama halnya dengan memberi peluang kepada kediktatoran untuk memperpanjang kekuasaannya. Sedangkan mereka yang tergabung dalam aksi boikot yakin bahwa aksi boikot membuka kemungkinan runtuhnya kekuasaan Marcos sebelum tahun 1987. Karena aksi boikot adalah merupakan salah satu diantara berbagai gerakan non kekerasan dan damai yang akhirnya dapat meruntuhkan kekuasaan Marcos.

Pemilu 1984 melahirkan kekuatan baru bagi pihak oposisi dalam parlemen, dengan komposisi 60 orang anggota parlemen dari Unido (organisasi Demokrasi Persatuan) yang diketahui oleh Salvador Laurel, 8 orang anggota PDP-Laban, 16 orang anggota dari kelompok independen. Dengan demikian jumlah kursi untuk kelompok minoritas adalah 86 dari 200 kursi seluruhnya di Batasang Pambansa⁶ perjuangan melalui parlemen bukan tanpa arti. Walaupun jumlah anggota parlemen dari partai oposisi tidak begitu besar, namun suara oposisi paling tidak akan berkumandang dalam sidang-sidang. Setidaknya akan merupakan peringatan kepada partai penguasa untuk mengekang nafsu mereka dari penyimpangan-penyimpangan yang terjadi selama ini. Keterbatasan suara mereka merupakan masalah dalam menyalurkan aspirasi mereka di dalam komisi-komisi parlemen yang dikuasai oleh partai Kilusang Bagong Lipunan, sehingga rancangan undang-undang yang diusulkan oleh kelompok oposisi selalu kandas ditengah jalan. Oleh karenanya, peranan oposisi dalam Batasang kurang begitu efektif.

⁵ Canoy, Reuben R., *The Conterfeit Revolution, The Philipines fom Martial Law to the Aquino Assasination*, Manila, 1984, Hal.53-57

⁶ *ibid*, Hal.75

Digital Repository Universitas Jember

Perjuangan untuk meruntuhkan rejim Marcos di Filipina dapat dikategorikan melalui dua cara yang paling menonjol, yakni dengan melalui proses lembaga demokrasi (pemilihan) serta melalui tekanan-tekanan demonstrasi.⁷ Tekanan demonstrasi bertujuan untuk menyampaikan kepada penguasa agar penguasa tahu apa yang dirasakan oleh rakyatnya. Perjuangan melalui parlemen dirasa kurang berhasil. Kesadaran timbul dikalangan oposisi, masih ada satu cara lagi untuk meruntuhkan kekuasaan Marcos, yakni dengan melalui tekanan demokrasi dalam hal ini dikategorikan sebagai parlemen jalanan. Pihak oposisi menyadari masih ada satu kekuatan lagi yang merupakan sentral perhatian dalam perjuangan mereka selanjutnya. Mereka percaya *people power* merupakan kunci keberhasilan dalam meruntuhkan rejim yang sedang berkuasa. Begitulah akhirnya, timbul aksi demonstrasi sebagai penekan terhadap rejim Marcos. Aksi demonstrasi ini mewarnai percaturan politik di Filipina, terutama di Manila yang berhasil menjadi bagian dari sistem politik. Gejolak politik semakin menjadi. Gejolak ini merongrong Marcos untuk segera meletakkan jabatannya sebagai presiden Filipina, untuk kemudian digantikan oleh penguasa yang lebih demokratis sesuai dengan konstitusi yang berlaku. Sehingga tidak lagi terjadi pelanggaran terhadap hak-hak asasi, korupsi yang terjadi diantara para pejabat pemerintah, intimidasi dan sebagainya akan semakin berkurang⁸.

Kondisi yang sudah tidak terkendali serta ditambah adanya krisis ekonomi dan banyaknya aksi demonstrasi yang dilakukan oleh rakyat, hal ini membuat posisi Marcos menjadi terancam. Untuk meredakan ketegangan politik yang berkembang, presiden Marcos memutuskan untuk menyelenggarakan pemilihan presiden dengan cepat (*snap election*), yang semula akan di adakan pada tahun 1987 sesuai konstitusi 1973, kemudian dipercepat menjadi 7 februari 1986,⁹ agar rakyat bisa menjatuhkan pilihan mereka, apakah akan memilih Ny. Corason atau Marcos. Kampanye-kampanye yang dilakukan kedua belah pihak menjelang pemilu dalam februari 1986 berlangsung dalam frekuensi yang tinggi. berkali-kali

⁷ *Ibid*, Hal.71

⁸ John Bresnan, "*Krisis Filipina*" *Zaman Marcos dan Keruntuhannya*, Gramedia, Jakarta, 1988

⁹ Syahbuddin Mangandaralam, *Mengenal Dari Dekat Filipina, Tanah Air Patriot Pujangga Jose Rizal*, Remadja Karya CV, Bandung, 1987, Hal.44

Digital Repository Universitas Jember

Marcos melancarkan serangan kealamat pribadi Ny. Corazon Aquino dengan cara meremehkan kemampuannya sebagai seorang wanita yang tidak memiliki pengalaman apapun di bidang politik dan pemerintahan. Isu yang dilontarkan oleh kubu Marcos ini menimbulkan ketidaksenangan kaum wanita di negeri itu, yang pada akhirnya sangat merugikan Marcos sendiri. Keputusan pemerintah untuk mengadakan proses pemilu yang dipercepat inipun didorong oleh adanya desakan dari Amerika Serikat yang berharap dengan pemilu akan tercipta stabilitas politik di Filipina.

Kubu Marcos pada awalnya merasa senang, atas perpecahan yang terjadi dalam tubuh oposisi. Mereka saling memperebutkan posisi kepresidenan untuk menggantikan posisi Marcos. Namun pada tanggal 11 Desember 1985, pihak oposisi kemudian sepakat untuk mencalonkan Ny. Corazon Aquino sebagai calon presiden dan Salvador Laurel dari UNIDO sebagai wakilnya Ny. Corazon Aquino dan Salvador Laurel rupanya berhasil menyatukan kelompok oposisi untuk berpartisipasi dalam pemilu tanggal 7 Februari 1986. Kehadiran Cory di tengah kemelut yang melanda Filipina diharapkan akan mampu menjernihkan suasana, dengan naiknya Ny. Corazon Aquino sebagai calon presiden Filipina dalam pemilu membuat rakyat Filipina terus melakukan aksi demonstrasi menuntut Marcos untuk mundur, kekuatan *people power* inilah yang menjadi inti kekuatan kelompok oposisi.

Perang perebutan pengaruh politik antara Marcos dan Ny. Corazon Aquino memang terburuk dalam sejarah politik Filipina. pada saat penghitungan suara COMELEC (Comission Electio/komisi pemerintah urusan pemilu) mengumumkan pasangan Marcos-Tolentino unggul atas pasangan Ny. Corazon Aquino dan Salvador Laurel. Sedangkan NAMFREL mengumumkan bahwa pasangan Ny. Corazon Aquino & Salvador Laurel unggul dibanding Marcos dan Tolentino. perbedaan ini kemudian menjadi penyebab pertikaian antara kedua kubu yang memperebutkan jabatan tertinggi dalam pemerintahan di Filipina. kondisi ini juga mengakibatkan COMELEC dan NAMFREL terlibat konflik politik, karena ketidak selarasan itulah untuk menyelesaikan ketegangan politik yang terjadi maka penghitungan suara dilimpahkan kepada Parlemen (Batasang

Pambansa) Batasang Pambansa. Namun Batasang Pambansa ternyata didominasi oleh kubu Marcos, selanjutnya tanggal 16 Februari 1986, Batasang Pambansa mengeluarkan pernyataan bahwa hasil perhitungan suara menunjukkan keunggulan di pihak Marcos. NAMFREL yang mengamati jalannya perhitungan suara pada 7 februari 1986 yakin bahwa hasil perhitungan suara nasional yang dilakukan oleh parlemen tidak mencerminkan suara yang sebenarnya dari rakyat Filipina sehingga pejabat penghitung suara mulai kehilangan kredibilitasnya, berhubung angka yang diumumkan oleh komisi pemilu pemerintah berbeda dengan hasil perhitungan pihak Namfrel yang dilakukan secara manual. Hal ini mendorong timbulnya protes yang dilancarkan semua pihak. Rakyat beranggapan hasil perhitungan suara tersebut tidak sesuai dengan penghitungan suara yang sebenarnya.

Angka terakhir hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Namfrel adalah 7.835.070 suara untuk Ny. Corazon Aquino, sedangkan 7.053.068 suara untuk Marcos, masing-masing untuk jabatan presiden. Sementara untuk jabatan wakil presiden, 7.441.313 suara untuk Laurel dan 6.613.507 suara untuk Talentino. Penghitungan ini didasarkan kepada jumlah suara yang tercantum dalam lembaran kartu pemilihan yang telah disahkan oleh Inspektur Badan Pemilih dan kemudian diterima oleh pekerja-pekerja sukarelaawan pada hari pemilu. Perhitungan ini mewakili 60.211 daerah pemilihan yang menyamai sekitar 70% dari jumlah suara. Namfrel sudah tidak mampu mengorganisasi atau menjalankan fungsinya. Namfrel yakin dengan berdasarkan penelitian statistik dan lapangan penghitungan suara tersebut yang sesungguhnya.

Sebagai reaksi atas deklarasi yang dikeluarkan oleh Batasang Pambansa, Ny. Corazon Aquino menyerukan untuk mengadakan pembangkangan umum dalam bentuk aksi boikot terhadap perusahaan yang ada kaitannya dengan Marcos, juga melakukan aksi mogok umum dan demonstrasi. Tindakan ini mendapat dukungan penuh dari pihak gereja katolik. Nampaknya, keunggulan yang diperoleh oleh Ny. Corazon Aquino diluar dugaan Marcos. Segala upaya yang dilakukan Marcos untuk mempertahankan kedudukannya termasuk langkah dengan membeli suara, mengadakan konsolidasi dengan seluruh aparat

pemerintah dari semua tingkatan dan yang paling kronis dengan manipulasi suara, tidak membuahkan hasil. Kecurangan inilah yang memalingkan perhatian sebagian masyarakat termasuk sebagian orang-orang Marcos yang menyeberang ke oposisi. Mereka diantaranya, menteri pertahanan Juan Ponce Enrile dan Kepala Staf Fidel Ramos. Menurut mereka Ny. Corazon Aquino seharusnya yang memenangkan pemilihan tersebut. Tidak ada jalan lain, kecuali rakyat sendiri secara langsung memproklamkan Ny. Corazon Aquino tanpa melalui lembaga-lembaga resmi yang dikuasai oleh Marcos, kemudian pada tanggal 16 Februari 1986 dalam rapat akbar di taman Rizal yang dihadiri sekitar setengah juta suara, Ny. Corazon Aquino dan Salvador Laurel dinobatkan menjadi presiden dan wakil presiden tandingan. Sementara itu, pada saat yang sama Batasang Pambansa juga mengumumkan hasil pemilu yang memenangkan kembali pasangan Marcos-Tolentino untuk jabatan periode berikutnya. Sehingga untuk beberapa saat Filipina memiliki dua presiden hasil pemilihan umum pada tanggal 7 Februari 1986.

3.1.1 Elemen Yang Terlibat dalam Gerakan Massa I

Terjadinya gerakan massa atau yang lebih dikenal dengan “people power” di Filipina pada era Marcos di tahun 1986 dapat dikatakan telah melibatkan semua elemen masyarakat Filipina terutama dari kalangan oposisi. Untuk tujuan analisis, dalam hal ini oposisi Filipina dapat dibagi dalam enam golongan : elit politik sebegini keadaan darurat¹⁰, Partai Komunis Filipina, gereja katolik, mahasiswa, buruh dan penghuni liar di kota (urban squatters) dan pemberontak muslim.¹¹ Pembagian golongan ini berdasarkan pada ambisi dan loyalitas pribadi, basis politik, ideologi dan taktik perjuangan mereka dalam usahanya untuk mewujudkan cita-cita yang mereka kehendaki. Sebelum

¹⁰ keadaan darurat yang dimaksud disini adalah keadaan sebelum Marcos memberlakukan “Martial Law” yaitu, undang-undang darurat

¹¹ lihat Robert A. Scalario, *Asia Tenggara Dalam Tahun 1980-an*, dalam Lela G Noble, *Perkembangan Politik di Filipina : Stabilitas Jangka Pendek, Resiko Jangka panjang*. CSIS, Jakarta, 1985, hal 32. Dikutip dari Larry Nicksch dan Marjorie Niehaus, *Internal Situation in The Philippines: Current Trends and future Prospects*, Congressional Research Service, Library of Congress, 20 Januari 1981, hal CRS-X. daftar mereka juga menyebutkan angkatan bersenjata sebagai sumber oposisi

berlakunya undang-undang darurat, oposisi-oposisi ini telah diafiliasi dalam United Democratic Opposition (UNIDO) yang kemudian mereka memberi preferensi bagi berakhirnya keadaan darurat di Filipina dengan persyaratan yang memulihkan hak-hak demokrasi secara utuh, mereka juga menganjurkan untuk memboikot pemilihan umum, keputusan untuk memboikot pemilihan umum pada masa itu dibuat karena anggota-anggota Unido tidak percaya bahwa Marcos akan menyetujui persyaratan mereka untuk ikut serta, aksi boikot ini memberi kesan bahwa oposisi tidak lagi percaya, bahwa dengan menganut cara-cara kontitusional mereka akan diperbolehkan berpartisipasi secara efektif dalam menentukan atau mengubah kebijakan nasional. Kelompok oposisi ini pada masa itu hanya bertujuan agar pemberlakuan keadaan darurat di Filipina dapat diakhiri. Beberapa kelompok oposisi lain yang juga aktif menentang Marcos adalah gerakan "light a fire" yakni kelompok yang berpangkalan di Manila dan dipimpin oleh seorang pengusaha terkemuka, Eduardo Olaguer, kelompok ini di bongkar pada tahun 1979. Kelompok lain yang aktif dalam melakukan rongrongan pada rejim Marcos adalah Partai persatuan Demokrat Sosialis Filipina (United Party of Democratic Socialists of the Philippines), mereka menyatakan bertanggung jawab atas pemboman-pemboman yang terjadi di Manila. Kelompok lain adalah The Communist Party of the Philippines (CPP), kelompok ini memiliki pendirian bahwa penggunaan kekerasan dianggap perlu jika rejim Marcos hendak diganti, strategi yang mereka pakai adalah dengan membuat front nasional bersamadengan tujuan adalah suatu revolusi yang membuka jalan ke pembentukan masyarakat radikal komunis. Di sisi lain kekuatan mahasiswa, buruh, dan penduduk miskin kota dianggap sebagai kelompok-kelompok penting karena terpusat di Manila dan kesedian mereka untuk mengadakan demonstrasi dan menentang hal-hal tertentu.

Kelompok religius dalam hal ini gereja katolik juga termasuk kelompok yang dapat dikatakan menentang pemerintah otoriter Marcos. Posisi gereja Katholik terhadap rejim ini tercermin dalam kebijaksanaan Kardinal Jaime Sin. Artinya pendapat pimpinan gereja akan lebih kritis jika seandainya kondisi hidup rakyat semakin merosot serta berlangsungnya pelanggaran hak asasi manusia. Dalam sebuah negara yang berpenduduk sebagian besar beragama Katolik dan

sedang mengalami krisis politik dan sosial, sangat wajar jika seandainya Gereja Katolik ikut memainkan peran politiknya, namun hal itu akan terjadi secara lambat laun dalam proses yang cukup lama.¹² Di Filipina kekuasaan penjajahan Amerika Serikat menyebabkan kedudukan gereja mengalami perubahan besar, hal ini terjadi setelah Filipina menerapkan konstitusi 1935 yang sama dengan konstitusi Amerika Serikat. Perubahan ini terjadi dengan menerapkan prinsip pemisahan antara gereja dan negara serta prinsip kerukunan umat beragama. Sebagian besardarilangkah pembaharuan ini masih tetap dipertahankan setelah kekuasaan Amerika Serikat di Filipina berakhir. Baik prinsip pemisahan antara gereja dan negara maupun prinsip kerukunan beragama diterima secara positif baik oleh kalangan pejabat Gereja maupun umat Katolik yang masih tetap merupakan mayoritas di Filipina. Gereja selaku lembaga, sedapat mungkin menghindari keterlibatan dalam urusan politik, kecuali bila mengalami serangan dari pihak legislatif, seperti pengambilan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan doktrin-doktrin yang dianut.

Dalam tahun-tahun pertama diberlakukannya Undang-undang Darurat, Kardinal Sin masih membatasi kecambahnya terhadap tindakan-tindakan pengekan yang khusus menyangkut hak-hak Gereja dan rohaniawannya. Dari situ kecambahnya secara bertahap makin meluas, menjadi terarah pada tindakan dan kebijakan rezim Marcos, terutama tentang kurangnya perhatian terhadap kaum miskin dan penyalahgunaan kekuasaan ekonomi dan militer. Pada tahun 1982, Kardinal Sin menyerukan agar demokrasi dipulihkan dan mendesak Marcos untuk menyerahkan kepemimpinan serta meminta Amerika Serikat untuk menghentikan bantuan militer kepada pemerintah Filipina, mengingat kemungkinan bantuan tersebut digunakan untuk membunuh sesama orang Filipina. Setelah pembunuhan Benigno Aquino, Kardinal Sin menjadi bersikap tandas dalam mendesak Marcos untuk menundurkan diri. Pernyataan sikap itu kadang-kadang terjadi dalam koordinasi dengan tokoh-tokoh pemimpin politik dan bisnis. Secara lebih tertutup ia juga menawarkan bantuan agar peralihan

¹² John Bresnan, *op.cit.* hal 158

kekuasaan itu dapat berlangsung secara sedikit banyak mulus bagi Marcos. Setelah menemui kegagalan dengan ihtiarnya itu, Kardinal Sin meneruskan desakan agar demokrasi dipulihkan di Filipina. Dengan kata lain, Gereja Katolik telah bertindak di luar tradisinya, terdorong untuk secara aktif memainkan peranan politiknya, selama rezim Marcos berkuasa boleh dibilang Gereja Katolik berjalan sendiri dalam memperingatkan rezim Marcos tentang ekseseks dari penerapan kekuasaan oleh mereka. Peringatan ini dilakukan secara terbuka dan makin lama semakin keras, mulai kardinal hingga jajaran pastor di daerah-daerah. Hal ini menjadikan mereka sebagai tempat berlindung bagi masyarakat biasa dalam mengecam rezim Marcos, yang berarti suara Gereja menjadi bertambah lantang. Setelah pembunuhan Benigno Aquino, lenyaplah segala hambatan yang semula masih ada, para pemimpin dari segala lapisan sosial melancarkan serangan gencar terhadap pemerintah. disini Gereja menyadari bahwa mereka tidak perlu lagi bertindak sebagai pengecam utama, tetapi fungsi mereka sekarang adalah sebagai pengontrol terhadap kemungkinan meningkatnya aksi-aksi kekerasan, baik dari kalangan oposisi maupun pemerintah. ketika krisis kemudian meruncing, Kardinal Sin menawarkan diri sebagai penengah demi terlaksananya peralihan kekuasaan secara damai. Dilain pihak para pastor yang lebih radikal bertindak memberikan teladan dan dukungan moral kepada umat Kristen yang ingin menerjunkan diri ke dalam kegiatan revolusioner

3.1.2. Krisis Kepemimpinan Marcos

Ketika dipilih sebagai presiden pada 1965, Marcos menghadapi masalah perekonomian yang serius yaitu defisit neraca pembayaran yang cukup besar. Kebijakan-kebijakan yang telah dikeluarkan oleh Marcos ternyata tidak mampu mencegah kemerosotan ekonomi yang dialami oleh Filipina pada masa itu, ditambah lagi adanya konflik sosial yang sering terjadi di Filipina. disamping itu Marcos juga mengalami krisis kepemimpinan politik politik, karena adanya pembatasan kekuasaan seorang presiden,¹³ atas dasar menjaga stabilitas Filipina maka Marcos mendeklarasikan Undang-undang Darurat pada 1972. Seiring

¹³ pembatasan kekuasaan seorang presiden di Filipina saat itu masih mengacu pada konstitusi 1937, yang mengatur tentang masa bakti presiden dan wewenang seorang presiden

Digital Repository Universitas Jember

dengan dideklarasikannya Undang-undang Darurat ini maka, Marcos dapat membekukan partai politik, artinya bahwa dengan berlakunya Undang-undang Darurat di Filipina kekuasaan negara menjadi sangat dominan dan tersentralisasi dan membatasi peran sosial politik masyarakat Filipina.¹⁴ Marcos juga dipandang, sebagai pencuri yang telah menguras habis kekayaan negerinya. Pada awal masa baktinya yang kedua sebagai presiden Filipina, memang sudah terdengar bahwa ia dan istrinya secara tidak sah sedang menumpuk kekayaan bagi keluarganya. Awalnya hal ini hanya dianggap sebagai gosip saja, akan tetapi isu tersebut terus berkelanjutan. Marcos dengan angkuhnya menantang pembuktiannya. Pada masa itu media massa Manila dikenal sebagai media pers paling bebas, mulai mengungkapkan dan membeberkan cara-cara Marcos menumpuk kekayaannya.¹⁵ Adanya publikasi tentang isu korupsi dan kolusi dilakukan oleh pemerintahan Marcos ini mampu membentuk opini publik yang kuat. Namun oposisi masih dapat dikatakan berjuang hanya berdasarkan pada misi dan visi masing-masing jadi dapat dikatakan bahwa oposisi masih tercerai berai, walaupun diberbagai daerah di Filipina masih sering terjadi gejolak atau pemberontakan-pemberontakan yang dilakukan oleh kelompok separatis bersenjata seperti misalnya kelompok muslim Moro dan New's People Army dan aksi-aksi lain yang sebenarnya masih bersifat insidental yang dilakukan oleh kaum buruh dan mahasiswa. Pada masa itu oposisi memang terpecah-bealah, dan perpecahan ini pada jangka pendek menunjang stabilitas rejim.¹⁶

Untuk melanggengkan kekuasaannya namun atas dasar menjaga stabilitas Filipina, maka Marcos memberlakukan Undang-Undang Darurat pada tanggal 21 September tahun 1972. Marcos berdalih pada kerugian-kerugian yang diderita oleh masyarakat akibat demonstrasi dan pemberontakan yang selama ini terjadi di Filipina. namun dengan diberlakukannya Undang-undang Darurat itu maka

¹⁴ Jane Hutchison, *Class and State Power in The Philippines*, Hewison, Robinson & Rodam, ed, *South East Asia in 1990's, Authoritarianism, Democracy & Capitalism*, Unwin & Milen, St.Lionored

¹⁵ lihat Felix B. Bautista, *Pers alternatif Filipina dan Tumbangnya Seorang Dictator*, dalam Larry Diamond, ed., *Revolusi Demokrasi, Perjuangan untuk Kebebasan dan Pluralisme di Negara Sedang Berkembang*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1994, hal 190.

¹⁶ *Ibid.* hal 37

Digital Repository Universitas Jember

masyarakat Filipina terpecah menjadi dua kelompok, pertama, adalah kelompok yang menentang adanya undang-undang Darurat, artinya kelompok ini terkena dampak secara langsung dari kebijakan tersebut seperti pemimpin oposisi, para orang tua yang anaknya di penjara karena melakukan kegiatan politik termasuk kalangan pengusaha nasional yang juga merasa dirugikan karena adanya peningkatan upaya pemerintah untuk menarik modal asing. Kedua, kelompok yang merespon baik dari adanya Undang-undang Darurat. Asumsi dari kelompok masyarakat ini adalah, untuk tercapainya sebuah stabilitas keamanan yang kondusif untuk perkembangan ekonomi diperlukan adanya suatu sistem yang “otoriterisme” untuk membangun suatu masyarakat baru.¹⁷ Melihat maraknya aksi demonstrasi yang dilakukan oleh mahasiswa, buruh dan kaum urban bagi mereka sangat menggelisahkan dan sangat mengancam stabilitas keamanan Filipina. mereka beranggapan bahwa pemberlakuan Undang-undang Darurat ini hanya bersifat sementara dan sanggup untuk membawa Filipina kearah yang lebih baik, disamping itu kebangkitan perekonomian Filipina pada dasawarsa 70-an juga memberikan motivasi tersendiri bagi mereka.¹⁸ Berlakunya Undang-undang Darurat ini pada sisi lain memberikan ruang yang cukup luas bagi Marcos untuk membentuk ‘regim totaliter’¹⁹ yang sah karena berdasar Undang-undang Darurat.

Namun dukungan terhadap Undang-undang Darurat mulai menyusut, penyebabnya adalah perkembangan ekonomi Filipina yang menjadi lesu, kesalahan manajerial di bidang ekonomi nampaknya juga ikut menjadi penyebab, sebab lain merosotnya dukungan masyarakat terhadap Undang-undang Darurat ini adalah kesadaran yang semakin meluas dikalangan masyarakat bahwa kecil kemungkinannya pemerintahan yang otoriter akan bersifat sementara artinya akan

¹⁷ *Ibid.* hal 196

¹⁸ Carl H. Landle, *Krisis Politik*, dalam John Bresnan, ed., *op.cit.*, hal 156

¹⁹ Regim totaliter sendiri secara singkat dicirikan dengan intervensi pemerintah yang massif ke dalam kehidupan sosial-ekonomi setiap warga negara, yang dimotivasi oleh tujuan-tujuan utopis serta terkadang di ilhami oleh kediktatoran komunis. Sementara itu Marco termasuk tipe regim otokrasi tradisional, menurut wintrobe (1990) dicirikan dengan sikap pemerintahan yang berkuasa yang tidak (terlalu) mengganggu kehidupan sosial ekonomi rakyatnya dan hanya menekan rakyat sekedar demi melanggengkan kekuasaannya, contoh lain adalah Samosa di nikaragua atau Shah Iran. Nt. Budi Harjanto, *Gerakan Mahasiswa Pasca Transisi Kepemimpinan Nasioanal; “Quo Vadis”*, Analisis CSIS, Tahun XXVII, No.3, Juli-September 1998.

Digital Repository Universitas Jember

secepatnya berakhir seperti yang dijanjikan, ditambah kepekaan yang semakin bertambah terhadap pelanggaran hak-hak asasi serta penyalahgunaan wewenang yang sebenarnya tidak mungkin terjadi jika seandainya sistem checks and balances masih terdapat dalam sistem politik Filipina seperti sebelum tahun 1972 atau sebelum berlakunya Undang-undang Darurat.²⁰ Indikasi turunya dukungan masyarakat ini tampak dari semakin membesarnya wujud simpati masyarakat Filipina terhadap demonstrasi-demonstrasi mahasiswa yang timbul lagi pada tahun 1977. Gelombang aksi demonstrasi menyusul peristiwa pembunuhan terhadap Benigno Aquino lebih besar dan berlangsung lama, dan untuk pertama kalinya kalangan pengusaha banyak berperan dalam mengorganisasikan demonstrasi-demonstrasi yang tidak hanya berlangsung di kampus-kampus tapi juga menjalar sampai ke daerah-daerah pusat perdagangan.

Kekecewaan masyarakat Filipina atas pemerintahan Marcos yang otoriter itulah yang pada akhirnya melahirkan kebencian masyarakat Filipina terhadap pemerintahan Marcos, isu pelanggaran hak asasi manusia, korupsi dan kolusi serta kesewenangan Marcos yang pada akhirnya menimbulkan terjadinya krisis ekonomi di Filipina yang berkepanjangan. Atas latar belakang itulah oposisi bertekad dan bersatu untuk menggulingkan Marcos.

3.2 Karakteristik Gerakan Massa I

Kejatuhan Marcos dari kursi kepresidenan dapat dikatakan berlangsung cepat, mendadak dan dramatis, gerakan massa era Marcos ini efektif hanya berjalan beberapa hari saja terhitung dari 22 sampai 25 Februari 1986. Namun perjuangan melawan kediktatoran Marcos sudah berlangsung sangat lama dan hal itu membawa korban jiwa yang cukup banyak pula. Jika kita lihat berapa lama Marcos memimpin Filipina yakni dua puluh tahun, maka Marcos tergolong presiden yang cukup lama memimpin Filipina, jadi wajar jika seandainya masyarakat Filipina membayangkan bahwa untuk menggulingkan seorang diktator yang sudah lama bercokol puluhan tahun pasti akan membawa banyak korban dipihak sipil.

²⁰ Carl H. Landle *Op. Cit.* hal 157

Digital Repository Universitas Jember

Gaya kepemimpinan yang cenderung otoriter itulah yang membuat beberapa kelompok oposisi melakukan berbagai aksi turun ke jalan dan melakukan tindakan separatisme, berlakunya Undang-undang Darurat maka Marcos dengan mudah menangkapi para pemimpin serta organisator oposisi. Namun perjuangan yang dilakukan oleh oposisi untuk menggulingkan Marcos dari kursi kepresidenan masih terpecah-pecah atau berjalan sendiri, semua skenario yang dirancangpun akan gagal menghadapi rezim Marcos yang otoriter, apalagi ditunjang oleh keberpihakan militer dikubu Marcos membuat posisi Marcos menjadi kuat. Dengan semua kegagalan skenario yang terdahulu itulah, membuat pihak oposisi sadar bahwa kegagalan gerakan yang mereka lakukan adalah karena mereka gagal atau tidak pernah memperhitungkan untuk menghadirkan atau melibatkan lapisan masyarakat yang jumlahnya besar dan kebanyakan terdiri dari golongan menengah dan terutama yang berdomisili di Metro-Manila yang sewaktu-waktu dapat dikerahkan secepat kilat. Dalam aksi demonstrasi yang melibatkan golongan menengah ini pertama kali muncul pada saat bertepatan dengan pemilihan umum tanggal 7 februari 1986.

Awalnya nampak, bahwa lautan manusia yang mendukung Ny. Corazon Aquino sebagai suatu kekuatan yang tidak terorganisir dan tanpa bentuk. Namun hampir, seluruhnya masyarakat yang terlibat terdiri dari golongan menengah penduduk Metro-Manila²¹. Dengan berbagai latar belakang peristiwa tiulah maka dua orang pejabat militer Filipina, Enrile dan Ramos menyatakan mengundurkan diri, namun mereka juga mengajak rekan mereka di tubuh militer untuk mencabut kesetiannya kepada rejim Marcos. Mereka juga memberitahukan kepada media massa di Filipina bahwa Undang-undang Darurat yang telah dicabut atas protes darirakyat Filipina itu akan diberlakukan kembali, mereka juga menyadari bahwa pasukan Jenderal Fabian Ver akan menangkap mereka atas pembangkangan mereka, secara teknis kekhawatiran mereka akan ditangkap oleh Marcos ini

²¹ Kendati demikian, beberapa fraksi golongan kiri Filipina menganggap hal itu sebagai sebuah skenario besar yang sudah diperhitungkan terlebih dahulu yang dimotori oleh Amerika Serikat, dan sejak diumumkannya pemilihan umum untuk memilih presiden oleh Marcos, golongan kiri melihat ni sebagai sebuah momentum untuk dapat meraih kursi kepresidenan. Dan asumsi itu terus dihidup-hidupkan dalam waktu yang cukup lama.

Digital Repository Universitas Jember

memang beralasan karena Marcos dan Jenderal Fabian Ver menguasai bagian terbesar dari angkatan bersenjata Filipina. Namun pembangkangan mereka ini ternyata disambut baik oleh masyarakat Filipina, dukungan ini semakin besar tatkala Jaime Kardinal Sin²² secara terbuka mendukung perjuangan prajurit-prajurit yang membangkang tersebut dan yang terpenting Kardinal Sin mengajak semua rakyat Filipina untuk bergabung membantu Ramos dan Enrile, pendukung Aquino semakin lama semakin besar di kota-kota besar lainnya di Filipina. Melihat kondisi ini maka Marcos pada tanggal 24 Februari 1986 memerintahkan untuk membubarkan warga yang melakukan demonstrasi dengan perintah tembak mati. Namun prajurit bersenjata lengkap itu tidak dapat berbuat banyak karena tank-tank mereka harus berhadapan dengan rantai tangan manusia yang terdiri dari pelajar, mahasiswa dan pastur serta biarawati. Melihat kondisi itu, para prajurit itupun akhirnya luluh dan meletakkan senjata mereka dan mendukung gerakan masyarakat sipil tersebut.

Pembangkangan prajurit militer itulah merupakan suatu titik balik. Artinya pada awal Februari dimana terjadinya gerakan massa dapat dikatakan sebagai sebuah gerakan yang pasif atau defensif karena mereka menyadari pada saat itu, Marcos masih dianggap terlalu kuat, dan oposisi yang ada masih terpecah dan tidak satu visi. Namun dengan adanya pembelotan beberapa perwira militer Filipina itu, maka kelompok demonstran melakukan langkah yang cenderung ofensif dengan mengambil alih stasiun televisi pemerintah²³ termasuk melakukan perlawanan kepada prajurit di istana kepresidenan yang masih loyal pada Marcos. Puncaknya pada tanggal 25 Februari 1986, setelah memasuki hari keempat, dimana pada saat itu Marcos memutuskan untuk mengadakan upacara pelantikan atas dirinya sebagai presiden Filipina. Namun pada saat yang sama, jutaan massa rakyat Filipina berada di jalan Raya EDSA sebagai wujud rasa solidaritas mereka terhadap sesama warga yang telah berjuang melepaskan kediktatoran Marcos yang telah mereka alami semenjak 1972.

²² Uskup Agung Filipina

²³ Randolph S. David, *Revolusi Tanpa Air Mata; Catatan Tentang Kekuatan Massa Dan "Pemberontakan" Februari 1986 di Filipina*, Prisma No.8, LP3ES, Agustus 1986, hal 22

Digital Repository Universitas Jember

Bila dilihat dari sifat serta bagaimana proses munculnya gerakan tersebut, dan sebab-sebab yang mendasari gerakan massa pada era Marcos dan termasuk tujuan yang ingin dicapai, dan atas dasar apa tujuan tersebut ingin dicapai, maka secara umum dapat dikatakan bahwa gerakan massa era Marcos ini memiliki dua dimensi yang saling terkait. Pertama, gerakan massa pada bulan februari 1986 merupakan sebagai sebuah bentuk gerakan rakyat sebagai suatu reaksi spontan atas peristiwa terbunuhnya Benigno Aquino, gerakan massa semacam ini biasanya tidak memiliki perencanaan yang matang, karena hal ini merupakan bentuk reaksi langsung. Kedua, gerakan massa pada saat itu merupakan kristalisasi kebencian masyarakat terhadap pemerintah Marcos yang telah gagal membawa Filipina kearah yang lebih baik, termasuk didalamnya terdapat langkah-langkah terorganisir dengan tujuan, strategi dan cara-cara yang telah dirumuskan dengan jelas sebelumnya dan didasarkan kepada suatu analisis sosial yang kuat²⁴ indikasinya yaitu, aksi demonstrasi bukanlah suatu hal jarang terjadi di Filipina pada pemerintahan Marcos. Namun akibat penguasa yang otoriter, jarang tujuan dari aksi-aksi yang mereka lakukan tercapai dan aksi itu selalu berakhir dengan tindakan aparat pemerintah yang menyelesaikan dengan represif termasuk menangkap para promotor dari aksi. Klasifikasi gerakan tersebut di rumuskan untuk dapat memahami karakteristik sebuah gerakan, memang secara umum gerakan sendiri memiliki dua tipe sederhana yang bisa kita lihat sebagai sebuah kerangka analisis dalam persoalan ini, yakni²⁵ gerakan yang terorganisir dan gerakan sebagai suatu reaksi spontan; atas sebuah kejadian. Untuk kasus ini ditegaskan bahwa klasifikasi tersebut, hanya menunjuk pada penampakan permukaan dari gerakan massa tersebut.

Gerakan massa sendiri selalu diasumsikan dengan berbagai tindakan yang dilakukan untuk memberikan respon atau reaksi atas kondisi tertentu (realitas sosial) di masyarakat. Untuk itu, berbicara mengenai realitas sosial sudah tentu sangat luas dan kompleks. Dalam konteks gerakan massa I era Marcos ini kita

²⁴Timur Mahardika, "*Gerakan Massa*" *Mengupayakan Dekomrasi Dan Keadilan Secara Damai*, LAPERA, Yogyakarta, 2000

²⁵ *Ibid*

Digital Repository Universitas Jember

mengkaji atas reaksi (respon perlawanan) masyarakat terhadap hubungan-hubungan sosial yang ada dimasyarakat dan juga hubungan-hubungan kekuasaan yang terjadi antara masyarakat dan negara dalam hal ini rejim penguasa, yang dinilai bermasalah atau harus dirubah. Dalam banyak kasus gerakan perubahan secara mendasar ditentukan oleh dinamika dan konfigurasi kekuasaan. Yang dimaksud disini bahwa perubahan pada gilirannya akan ditentukan oleh tarik menarik antara kekuatan yang menghendaki perubahan dan kekuatan yang tidak menginginkan perubahan. Dari pemahaman tersebut, dalam gerakan massa I ini terdapat beberapa unsur yang bisa dikatakan menjadi variabel utama sebagai sebuah konsep atas munculnya gerakan saat itu: *Pertama*, keadaan saat itu yang dipandang buruk, menyimpan ketidakadilan, dan karena itu akan diubah. *Kedua*, keadaan masa depan, yang menjadi harapan, yakni keadaan yang diharapkan dan diperjuangkan oleh pihak yang mendorong perubahan. *Ketiga*, pihak rejim penguasa tidak bisa dihindari bahwa penguasa pada akhirnya harus menuai perlawanan atas tindakan atau keadaan yang diciptakan.. Maka tidak heran bila penguasa segera menuding pelaku gerakan sebagai subversi. Variabel itu yang kemudian mengalami kristalisasi dalam diri rakyat Filipina dan pada saat terdapat momentum²⁶ yang tepat, yakni ketika terjadi peristiwa pembunuhan Benigno Aquino. Sebab peristiwa tersebut merupakan salah satu wujud nyata kediktatoran Marcos, yang pada akhirnya menciptakan kemarahan masyarakat, terutama pendukung Benigno Aquino sendiri.

Setiap gerakan yang memaksudkan untuk mengadakan perubahan mendasar, tetap saja berhadapan dengan; (1) sistem dan (2) penjaga sistem (aparatus penjaga dan pihak diluar yang tidak setuju dengan sistem atau setidaknya menghendaki agar status quo tetap berjalan). Kekuatan gerakan pada gilirannya akan sampai pada suatu kondisi berhadap-hadapan. Konsep ini berlaku sangat umum. Jika ditinjau hubungan dinamis antara negara dan rakyat, maka bisa saja berupa hadap-hadapan antara rakyat vs negara atau sebaliknya negara vs rakyat.

²⁶ perubahan itu sendiri akan berlangsung jika terdapat tiga syarat; pertama, adanya ideologi alternatif. Kedua, adanya organisasi yang kuat, menjadi penopang, dan memiliki kemampuan mengorganisasikan dukungan rakyat. Dan ketiga, momentum yang tepat. *Ibid*

Digital Repository Universitas Jember

Antara pro perubahan vs status quo, atau status quo vs pro perubahan. Meskipun dalam kenyataan terdapat banyak yang terlibat dalam proses perubahan, namun pada satu titik tertentu akan terjadi semacam pengrucutan, sehingga yang tersisa hanyalah dua kelompok tersebut. cerita tentang detik-detik penggulingan penguasa lalim, selalu menunjukkan fakta tersebut, hal ini tampak pada kasus di Filipina, awalnya oposisi berjuang sendiri-sendiri sesuai dengan misi masing-masing, namun pada akhirnya masyarakat Filipina termasuk militer sendiri secara umum dapat dikatakan berdiri dalam kondisi yang berbeda, antara pro perubahan vs status quo, atau status quo vs pro perubahan.

Dalam situasi yang demikian akan terjadi beberapa kemungkinan: *pertama* kekuatan pembaharu lebih kecil (lemah) dibandingkan dengan kekuatan status quo; *kedua* kekuatan berimbang (relatif sama); dan *ketiga*, kekuatan pembaharu lebih besar (kuat) dibandingkan dengan kekuatan status quo. Jika yang terjadi adalah kondisi ketiga, maka dengan sendirinya gerbang perubahan terbuka lebar. Kekuatan pembaharu tidak perlu bersusah payah, sebaliknya jika yang terjadi adalah kondisi yang pertama, maka tugas dari kekuatan pembaharu untuk merumuskan strategi yang dapat memenangkan “pertarungan” meskipun dalam kondisi lemah.²⁷ Siasat yang dikembangkan sudah tentu sangat ditentukan oleh kondisi obyektif dan kondisi subyektif dari masing-masing pihak. Bagi pihak yang menghendaki perubahan terdapat dua kemungkinan utama, kooperatif. Untuk jalan yang kedua, masih terdapat kemungkinan lain, yakni menggunakan metode kekerasan atau pantang kekerasan. Dalam gerakan massa I, dapat kita simpulkan bahwa gerakan yang menginginkan perubahan terjadi di Filipina tergolong lebih besar dan kuat, terlebih lagi ketika beberapa perwira militer melakukan pembangkangan pada pemerintah Marcos dan beralih untuk mendukung gerakan massa pada saat itu. Dengan kekuatan pembaharu yang relatif lebih besar ini maka gerakan massa I, dapat tergolong sebagai sebuah gerakan kooperatif yang tidak menggunakan kekerasan untuk memperjuangkan tujuan yang ingin dicapainya.

²⁷ baca ; lebih lemah dari kekuatan yang tidak menghendaki perubahan



Berdasarkan uraian dan pembahasan di bagian-bagian sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa faktor penyebab munculnya gerakan massa II yang kemudian berimplikasi pada munculnya tuntutan pengunduran diri terhadap Joseph Estrada adalah akibat terungkapnya berbagai skandal korupsi dan suap atas diri Joseph Estrada. Terungkapnya beberapa skandal yang melibatkan Joseph Estrada sebagai presiden pada akhirnya membuat masyarakat Filipina menarik sebuah kesimpulan, bahwa pemerintahan Joseph Estrada tak ubahnya seperti kepemimpinan Marcos, dimana pada masa pemerintahan Marcos banyak sekali terjadi kasus serupa. Kaitannya skandal-skandal yang terjadi dengan munculnya gerakan masa adalah dengan terungkapnya beberapa skandal korupsi dan kasus suap ini kemudian ternyata telah memicu masyarakat Filipina untuk melakukan aksi protes menuntut untuk diberlakukannya impeachment terhadap Joseph Estrada. Namun konstelasi politik di parlemen ternyata sangat menguntungkan Joseph Estrada, karena 80 % dari 218 kursi parlemen merupakan koalisi kubu Joseph Estrada dari Labang Makabayang Masang Pilipino, LAMMP. Dominasi serupa terlihat di Senat yang beranggotakan 22 orang dengan jumlah perbandingan 11 suara kubu Joseph Estrada dan 10 suara kelompok oposisi sedang 1 suara abstain. Dengan komposisi yang demikian maka proses Impeachment melalui jalur parlemen tidak saja akan memakan waktu panjang, juga belum tentu akan berhasil, asumsinya jika seandainya proses pembuatan keputusan mengenai kasus suap itu menemui jalan buntu maka akan ditempuh melalui mekanisme voting, hal itulah yang tidak dikehendaki oleh rakyat Filipina sehingga rakyat terpicu untuk mengadakan sebuah gerakan aksi massa yang berlangsung serentak diberbagai kota besar di Filipina. sehingga proses impeachment yang semula menjadi tuntutan masyarakat terhadap Joseph Estrada, ternyata harus mengalami penundaan sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Dengan kata lain, impeachment telah gagal.

Kegagalan proses impeachment ini kemudian mengakibatkan kemarahan masyarakat Filipina dan memicu rakyat Filipina untuk melakukan aksi massa yang lebih besar lagi. Kekuatan massa ini semakin besar ketika aksi massa rakyat Filipina didukung oleh tokoh-tokoh elit politik Filipina dan pemimpin gereja Katholik. Gerakan massa yang dilakukan oleh rakyat Filipina, tidak lagi merupakan sebuah aksi yang menuntut impeachment terhadap Joseph Estrada. Akan tetapi, rakyat Filipina menuntut agar Joseph Estrada segera mengundurkan diri dari jabatannya sebagai presiden karena telah mengingkari amanah yang diberikan oleh rakyat Filipina.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

- Badan Penerbit UNEJ, 1998, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, Jember
- Bresnan, John, ed., 1988, "*Krisis Filipina*" *Zaman Marcos Dan Keruntuhannya*, Jakarta:Gramedia
- Budiarjo, Miriam, 1982, *Partisipasi dan partai politik*, Jakarta: Yayasan Obor.
- Canoy, Reuben R. 1984, *The Conterfeit Revolution, The Philipines Fom Martial Law To The Aquino Assasination*, Manila
- Diamond, Larry, 1994, *Revolusi Demokrasi, Perjuangan Untuk Kebebasan Dan Pluralisme Di Negara Sedang Berkembang*, Jakarta:Yayasan Obor Indonesia
- Gie, The Liang, 1979, *Ilmu Politik*, Yogyakarta:Gajahmada University Press
- Gregor, James.A., 1984, *Crisis In Philipines, Threat to U.S. Interest*, USA:The Ethnics and Public Policy Center
- Hadi, Sutrisno, 1995, *Metode Research*, Yogyakarta:Ansi Ofset
- Hoffer, Eric, 1988, *Gerakan Massa*, Jakarta:Yayasan Obor Indonesia
- Hutington, Samuel dan Nelson, John, 1994, *Partisipasi Politik di Negara Berkembang*, Jakarta:Rineka Cipta.
- Isabelo T. Crisostomo, 1973, "*Marcos The Revolutionary*".
- Luttwak, Edward, 1999, "*Kudeta*" *Teori Dan Praktek Penggulingan Kekuasaan*, Yogyakarta:Yayasan Bentang Budaya
- Mahardika, Timur, 2000, *Gerakan Massa*, Yogyakarta:LAPERA
- Mangandaralam, Syahbuddin, 1987, *Mengenal Dari Dekat Filipina, Tanah Air Patriot Pujangga Jose Rizal*, Bandung:Remadja Karya CV
- Marcos, Ferdinand. E., 1971, *Todays Revolution Democracy, Manila*,.
- Mas' oed, Mohtar, 1994, *Ilmu Hubungan Internasional Disiplin dan Metodologi*, Jakarta:LP3ES

- Nadaek, Kustigar & Atmadji, *Revolusi Damai, Rekaman Kemelut di Filipina*, Surabaya: Bina Ilmu.
- Robinson & Rodam, ed, 1990, *South East Asia in 1990's, Authoritarianism, Democracy & Capitalism*, St. Lionored: Unwin & Milen
- Russell, D.E.H., *Rebellion, Revolution and Armed Forces: A Comparative Study at Fifteen Countries with Special Emphasis on Cuba and South Africa*, Academy Press. Inc., New York, 1974. ;
- Segrave, Sterling, 1996, *Dinasti Marcos, Korupsi Harta dan Kekuasaan di Filipina*, Jakarta: P.T Dunia Pustaka Jaya
- Soemantri, Sri, 1976, *Sistem Pemerintahan Negara-Negara ASEAN*, Bandung: Tarsito
- Thayib, Anshari, 1986, *Jatuhnya Sang Diktator Marcos*, Surabaya: Bina Ilmu
- Uhlin, Anders, 1998, *Oposisi Berserak: Arus Deras Demokratisasi Gelombang Ketiga di Indonesia*, Mizan Pustaka, Bandung: Mizan

ARTIKEL DAN JURNAL

- Budiarjo, Miriam, *Pendekatan-pendekatan dalam Ilmu Politik*, Jurnal Ilmu Politik, AIPI, Jakarta, 1986
- David, Randolph S., *Revolusi Tanpa Air Mata; Catatan Tentang Kekuatan Massa Dan "Pemberontakan" Februari 1986 Di Filipina*, Prisma No.8, LP3ES, Agustus 1986
- Harjanto, Nt. Budi, *Gerakan Mahasiswa Pasca Transisi Kepemimpinan Nasioanal; "Quo Vadis"*, Analisis CSIS, Tahun XXVII, No.3, Juli-September 1998.
- Jackson, Karl, D., *The Philipines: The Search for a Suitable Democratic Solution, 1946-1986*.
- Noble, Lela G, *Perkembangan Politik di Filipina : Stabilitas Jangka Pendek, Resiko Jangka panjang*. CSIS, Jakarta, 1985
- Sin, Kardinal, *The Grand Conspiracy to Wreck the Erap Administration Big Business Mafia*, dalam <http://www.articles.com/philippines/>

Thayer, Carl, *Aksi Jalanan*, dalam <http://www.kompas.com/kompas-cetak/nasional/aksi06.htm>

Witoelar, Wimar, *Perspektif Wimar*, dalam www.gatra.com/

Yogaswara, Herry, *Dimensi Moral Presiden dan Gerakan Moral Rakyat di Filipina*, Kompas, 30 Oktober 2000

KORAN dan PUBLIKASI

Asia Week, 14 Juni 1996

Asia Week, 22 Desember 2000.

Asia Week, 12 Agustus 1999

Asia Week, 31 Juli 1998

Bisnis Indonesia, 2 Juli 1998

EIU Country Report 3rd quarter, 1998.

FEER, 14 Mei 1998

Harian Suara Merdeka, 13 Agustus 1985

Kompas, 6 Juni 1996

Kompas, 23 Desember 1997

Kompas, 4 Januari 1998

Kompas, 9 Mei 1998

Kompas, 10 Mei 1998

Kompas, 12 Mei 1998

Kompas, 13 Mei 1998

Kompas, 19 Mei 1998

Kompas, 1 Juni 1998

Kompas, 12 Juni 1998

Kompas, 20 Juni 1998

Kompas, 2 Juni 1998

Kompas, 8 Juli 1998

Kompas, 2 September 1999

Kompas, 21 Agustus 1999

Kompas, 19 Oktober 2000

Kompas, 20 Oktober 2000

Kompas, 1 Desember 2000

Kompas, 19 Januari 2001

Kompas, 20 Januari 2001

Kompas, 6 November 2000

Media Indonesia, 20 Agustus 1989

Media Indonesia, 8 Juni 1998

Media Indonesia, 17 Januari 2001

Philippines Free Press, 8 Juni 1996

Republika, 29 Mei 1998

Republika, 7 Juli 1998

Republika, 21 Agustus 1999
Republika, 1 Juli 1998
Republika, 13 Januari 2000
Suara Karya, 28 Oktober 2000
Suara Karya, 16 November 2000
Suara Pembaharuan, 12 juni 1996
Suara Pembaharuan, 24 Agustus 1999
Suara Pembaharuan, 05 November 2000
Today, 4 Mei 1996

INTERNET

<http://www.gatra.com/estrada.html>

<http://www.gov.ph>

<http://www.gov.ph/erap>

<http://www.articles.com>

<http://www.kompas.com>



Lampiran

Peta Filipina

